

LAMPIRAN - LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN ANGGARAN 2003



1. Laporan Perhitungan APBD

2. Nota Perhitungan APBD

3. Laporan Aliran Kas

4. Neraca Daerah

BUKU III

Lampiran Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2004

LAPORAN PERHITUNGAN APBD

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
LAPORAN PERHITUNGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2003

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
	Pajak Daerah	6.326.142.000,00	7.397.214.285,00	116,93%
	Retribusi Daerah	7.568.664.600,00	7.631.831.297,00	100,83%
	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Drh yg Dipisahkan	734.619.000,00	734.619.479,09	100,00%
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	16.471.953.000,00	16.551.004.898,88	100,48%
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	31.101.378.600,00	32.314.669.959,97	103,90%
	DANA PERIMBANGAN			
	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	17.862.728.000,00	20.113.982.428,00	112,60%
	Dana Alokasi Umum (DAU)	296.740.000.000,00	296.740.000.000,00	100,00%
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	6.300.000.000,00	6.300.000.000,00	100,00%
	Dana Perimbangan dari Propinsi	12.054.411.000,00	15.737.264.399,00	130,55%
	Jumlah Dana Perimbangan	332.957.139.000,00	338.891.246.827,00	101,78%
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
	Lain-lain Pendapatan yang Sah	28.692.590.000,00	27.604.075.408,00	96,21%
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	28.692.590.000,00	27.604.075.408,00	96,21%
	JUMLAH PENDAPATAN	392.751.107.600,00	398.809.992.194,97	101,54%
2	BELANJA			
	BELANJA - APARATUR			
	Belanja Administrasi Umum	79.753.209.000,00	71.877.853.291,00	90,13%
	Belanja Operasi & Pemeliharaan	8.614.024.000,00	8.127.632.517,00	94,35%
	Belanja Modal	26.556.138.000,00	26.449.161.700,00	99,60%
	Jumlah Belanja Aparatur	114.923.371.000,00	106.454.647.508,00	92,63%
	BELANJA - PELAYANAN PUBLIK			
	Belanja Administrasi Umum	186.375.556.000,00	173.419.053.803,00	93,05%
	Belanja Operasi & Pemeliharaan	29.963.712.000,00	29.696.079.627,00	99,11%
	Belanja Modal	38.286.106.000,00	38.148.353.876,00	99,64%
	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	39.712.777.500,00	39.393.679.164,00	
	Belanja Tidak Tersangka	3.415.000.000,00	1.315.364.000,00	
	Jumlah Belanja Pelayanan Publik	297.753.151.500,00	281.972.530.470,00	94,70%
	JUMLAH BELANJA	412.676.522.500,00	388.427.177.978,00	94,12%
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.925.414.900,00)	10.382.814.216,97	-52,11%

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	%
1	2	3	4	5
3	PEMBIAYAAN			
	PENERIMAAN DAERAH			
	SILPA Yang Lalu	39.711.033.769,59	39.711.033.769,59	100,00%
	Jumlah Penerimaan Daerah	39.711.033.769,59	39.711.033.769,59	100,00%
	PENGELUARAN DAERAH			
	Transfer ke Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00%
	Investasi Saham	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00%
	Pembyrn Pokok Pinjmn kpd Pemerth Pusat	41.583.200,00	41.583.200,00	100,00%
	SILPA Tahun Berjalan	244.035.669,59	30.552.264.786,56	12519,59%
	Jumlah Pengeluaran Daerah	19.785.618.869,59	50.093.847.986,56	253,18%
	JUMLAH PEMBIAYAAN	19.925.414.900,00	(10.382.814.216,97)	-52,11%

NOTA PERHITUNGAN APBD

BAB I PENDAHULUAN

1.1. UMUM

Penyampaian Laporan Perhitungan APBD merupakan pelaksanaan manifestasi kewajiban Pemerintah Kabupaten Lamongan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 86 Ayat (3) yang menetapkan bahwa : "Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan".

*Laporan Perhitungan
APBD disusun sesuai
dengan UU Nomor 22
Tahun 1999*

Bertitik tolak hal tersebut, maka penyampaian Nota Perhitungan APBD merupakan satu kesatuan dokumen yang harus disampaikan oleh Kepala Daerah setiap akhir tahunnya sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dimana didalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah harus menyertakan dokumen - dokumen sebagai berikut :

*Nota Perhitungan APBD
merupakan bagian dari
dokumen Perhitungan
APBD*

- a. Laporan Perhitungan APBD
- b. Nota Perhitungan APBD
- c. Neraca Daerah
- d. Laporan Aliran Kas

Untuk merancang dan menyusun dokumen – dokumen tersebut, diperlukan perubahan sistem pengelolaan

*Penyusunan Perhitungan
APBD diperlukan
perubahan sistem
keuangan daerah yang
berlaku selama ini*

keuangan daerah yang selama ini dilakukan. Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan Tata Usaha keuangan daerah dan penyusunan Perhitungan APBD, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan di Tahun 2003 telah melakukan perombakan sistem pengelolaan keuangan daerah.

Langkah Pertama dalam melaksanakan perubahan tersebut adalah dilakukannya perubahan sistem dan struktur APBD Tahun Anggaran 2003 yang telah mengadopsi sistem anggaran kinerja. Dengan diberlakukannya sistem anggaran tersebut maka didalam pelaksanaan laporan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mengimplementasikan sistem akuntansi double entry.

Sistem: anggaran kinerja dan sistem akuntansi double entry

Implementasi sistem akuntansi double entry merupakan suatu sistem pencatatan keuangan daerah yang lebih reliable dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah sebagaimana yang ditentukan didalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002. Dengan sistem tersebut maka pencatatan dapat dilaksanakan secara komprehensif terhadap semua kekayaan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Akuntansi double entry lebih reliable dalam menyusun laporan keuangan daerah

Dalam rangka mendukung pengimplementasian

Diperlukan infrastruktur dalam implementasi sistem akuntansi

akuntansi, maka Pemerintah kabupaten Lamongan juga telah menyiapkan infrastruktur dengan melalui Pendataan dan Sensus aset-aset daerah sehingga diharapkan semua kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat teridentifikasi dan terdata secara baik dan terstruktur.

Dengan melalui berbagai perubahan sistem didalam pengelolaan keuangan daerah tersebut, maka didalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Kepala Daerah Tahun Anggaran 2003 dapat disampaikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000.

LPJ Akhir Tahun anggaran 2003 penyusunannya disesuaikan dengan PP Nomor 108 Tahun 2000

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Kepala Daerah merupakan wahana dalam merefleksikan pelaksanaan jalannya Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu 2003. namun demikian didalam pelaksanaannya ditentukan oleh variabel-variabel yang sangat mempengaruhinya.

LPJ sebagai wahana dalam merefleksikan kegiatan pemerintahan

Besaran-besaran realisasi APBD Tahun 2003 sangat ditentukan oleh kondisi ekonomi makro yang mendasarinya. Dalam penyusunan APBD Tahun 2003 asumsi yang digunakan dalam menetapkan besaran APBD adalah kurs rupiah yang dipatok rata-rata sebesar Rp. 8.500,00, pertumbuhan ekonomi 4 % dan inflasi dibawah 2 digit. Dasar asumsi ini ditetapkan disesuaikan dengan dasar asumsi penetapan APBN.

Dasar asumsi penyusunan APBD 2003

Membaiknya kondisi politik dan keamanan sejak pertengahan tahun 2001 dan membaiknya berbagai indikator ekonomi makro mulai akhir tahun 2001 diharapkan dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi secara bertahap dalam tahun 2003.

Stabilitas yang semakin membaik

Pertumbuhan ekonomi nasional selama kurun tahun 2003 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dan diproyeksikan melampaui sebesar 4 %. Hal ini karena didasarkan pada perkembangan kondisi terakhir sejumlah asumsi-asumsi seperti nilai kurs rupiah yang mencapai rata-rata sebesar Rp. 8.350,-, nilai inflasi rata-rata sebesar 6 % dan perkembangan suku bunga Bank Indonesia yang mencapai level 6 % yang apabila dibandingkan dengan kuartal I Tahun 2003 berada pada level 12 – 13 %.

Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2003 diperkirakan melampaui 4 %

Sedangkan dari kinerja investasi di Tahun 2003 diperkirakan juga mengalami peningkatan, hal ini disebabkan adanya kenaikan indeks harga saham gaunga (IHSG) Bursa Eefek Jakarta yang telah mencapai level diatas 700. Angka tersebut menunjukkan adanya suatu peningkatan yang sangat mengembirakan karena level tersebut merupakan nilai yang sama sebelum adanya krisis moneter di tahun 1997.

Perkembangan investasi Tahun 2003

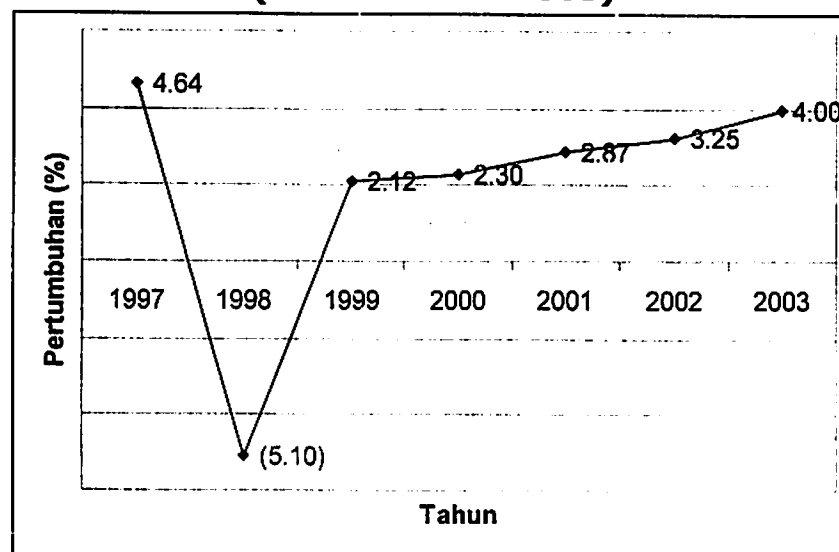
Secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Lamongan pada tahun 2003 dalam kondisi stabil,

Optimisme pertumbuhan ekonomi Lamongan

dalam artian pertumbuhan di berbagai sektor perekonomian merupakan peningkatan dari aspek eksternal maupun internal sebagai pendukung kestabilan ekonomi, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, kebijakan fiskal daerah, situasi moneter dan kondisi ekonomi makro. Optimisme perekonomian Kabupaten Lamongan di Tahun-Tahun mendatang sangat beralasan, hal ini dapat terlihat dari perkembangan perekonomian tiap tahunnya setelah krisis ekonomi menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hal ini juga didukung juga semakin stabilnya nilai rupiah, menurunnya tingkat suku bunga Bank Indonesia (SBI) dan kondisi politik dan keamanan yang semakin kondusif sehingga diharapkan mampu meningkatkan investasi di Kabupaten Lamongan.

Untuk melihat pertumbuhan perekonomian Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada grafik 1 dibawah ini :

Grafik 1
Pertumbuhan Perekonomian
(Tahun 1997 – 2003)



Dari data grafik 1 nampak bahwa setelah adanya krisis moneter, maka kondisi perekonomian yang dimulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 menunjukkan tahap penyembuhan dan meski digit pertumbuhan masih terlihat berjalan lamban dan cenderung stabil, namun hal ini masih dirasa sangat menggembirakan bagi para pelaku pasar ekonomi, juga bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan.

*Perkembangan
pertumbuhan ekonomi
tahun 1997-2003*

Sedangkan untuk Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2003 diproyeksikan mengalami pertumbuhan sebesar 4 % atau sama dengan proyeksi pada penetapan APBD 2003. Proyeksi tersebut didasarkan pada beberapa indikator yang menunjukkan perkembangan yang sangat positif dalam akhir tahun 2003, seperti kurs rupiah, tingkat inflansi dan suku bunga. Dengan demikian proyeksi tersebut merupakan perkiraan yang sangat realistis.

*Pertumbuhan ekonomi
Lamongan diperkirakan
sebesar 4 %*

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN NOTA PERHITUNGAN APBD

Maksud dan tujuan penyusunan Nota Perhitungan APBD ini adalah untuk :

*Maksud dan tujuan
penulisan Nota Keuangan*

1. Memberikan penjelasan secara kuantitatif dan kualitatif terhadap kinerja keuangan selama periode tahun anggaran 2003 ;
2. Merupakan penjabaran singkat terhadap kebijakan arah dan kebijakan pembangunan selama kurun

tahun 2003 ;

3. Menjelaskan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan ;
4. Memberikan gambaran terhadap perkembangan kekayaan daerah yang menjadi kewenangan dan hak Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Merupakan kelengkapan dokumen dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Daerah.

1.3. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN NOTA PERHITUNGAN APBD

Didalam penyusunan Nota Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2003 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

*Landasan Hukum
Penyusunan Nota
Keuangan*

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2839) ;
 6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
 8. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000

- tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2024) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah ;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2003 tentang Penetapan APBD Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2003 ;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penetapan Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2003.

21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 34 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN NOTA PERHITUNGAN APBD

Penyusunan Nota Perhitungan APBD merupakan penjelasan secara kualitatif dan kuantitatif yang memaparkan arah dan kebijakan umum dan realisasi APBD Tahun Anggaran 2003. Adapun kerangka penulisannya disusun sebagai berikut :

*Sistematika penulisan
Nota Perhitungan APBD*

1. Bab I memuat penjelasan umum mengenai hal-hal penting atau issue – issue strategis dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2003, antara lain mengenai perkembangan ekonomi nasional dan daerah serta dasar penyusunan APBD yakni tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan nilai tukar rupiah.
2. Bab II memuat uraian mengenai arah dan kebijakan umum APBD yang menjadi dasar penyusunan Strategi dan prioritas, program, kegiatan dan APBD.
3. Bab III memuat ringkasan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang disajikan dalam jumlah relatif atau perbandingan (dalam bentuk prosentase) dan memuat posisi dana cadangan daerah pada akhir tahun anggaran.
4. Bab IV memuat uraian penutup yang dapat berupa

simpulan-simpulan penting dan rekomendasi untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD pada Tahun Anggaran 2003

BAB II

KINERJA KEUANGAN DAERAH

2.1. ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat Lamongan, faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran pada penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat, sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 06 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002-2006, telah ditetapkan bahwa Visi Kabupaten Lamongan adalah **Terwujudnya masyarakat Kabupaten Lamongan yang sejahtera, maju, rukun, damai, adil dan berakhlak mulia.**

Visi Kabupaten Lamongan

Untuk mencapai Visi tersebut telah ditetapkan Misi Daerah sebagai berikut :

Misi Kabupaten Lamongan

1. Perwujudan keharmonisan masyarakat yang didukung dengan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.
2. Perwujudan kecerdasan masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan.
3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan hasil pertanian, kelautan, industri dan perdagangan.
4. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan

ekonomi utamanya bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar.

5. Peningkatan keseimbangan kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkepribadian dinamis, kreatif dan berdaya tahan terhadap pengaruh negatif globalisasi.
6. Peningkatan kualitas keseimbangan pelayanan masyarakat melalui penyiapan jasa publik yang transparan, responsive dan bertanggungjawab serta professional.
7. Penjaminan terhadap masyarakat atas keamanan ketertiban dan ketentraman.

Rencana Strategis (RENSTRA) Daerah Kabupaten Lamongan yang telah disusun sebagai tindak lanjut dari dokumen induk perencanaan sebelumnya (POLDAS dan PROPEDA) yang nota bene masih perlu ditindak lanjuti dengan sebuah konsep berupa Arah dan Kebijakan Umum APBD yang dulu kita kenal dengan REPETADA adalah merupakan action plant yang lebih bersifat teknis strategis dan memuat skala prioritas APBD.

RENSTRA disusun sebagai tindak lanjut dari POLDAS dan PROPEDA

Bahwa dalam upaya untuk tercapainya Visi dan Misi Daerah telah ditetapkan pada 3 (tiga) Tujuan Utama Renstra Daerah Kabupaten Lamongan, Sasaran, Program dan Kegiatannya. Sebagai implementasi dari kesungguhan dalam upaya untuk tercapainya Visi dan

Arah dan Kebijakan umum merupakan implementasi dari RENSTRA

Misi Daerah tersebut telah dipertegas dalam Strategi dan Prioritas pada Arah dan Kebijakan Umum APBD pada setiap tahunnya dalam Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Lamongan yang merupakan pelaksanaan dari Pola Pengembangan Sistem Management Pembangunan Partisitif dengan mengedepankan keberpihakan pada masyarakat sebagaimana tuntutan era reformasi pada pelaksanaan Otonomi Daerah yang selaras dengan tujuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam pelaksanaannya tetap berpedoman pada prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Di dalam Rencana Strategis Kabupaten Lamongan Tahun 2002–2006 telah diamanatkan bahwa tujuan Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

*Tujuan Pemerintah
Kabupaten Lamongan*

1. Terwujudnya peningkatan keuangan daerah melalui pelaksanaan otonomi daerah, dengan mengoptimalkan penggalian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah.
2. Terwujudnya peningkatan pelayanan masyarakat melalui kerjasama antar daerah dan dunia usaha, Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan deregulasi peraturan perundang-undang dunia

usaha serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

3. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan pelaksanaan otonomi daerah dan memanfaatkan terbukanya pasar global, kerjasama antar daerah dan dunia usaha serta pesatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Serbagai implementasi terhadap 3 (tiga) tujuan utama RENSTRA tersebut telah ditetapkan 9 (sembilan) sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

*Sasaran Pemerintah
Kabupaten Lamongan*

1. Mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah
2. Menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah
3. Menggali, memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah
4. Mengoptimalkan kerjasama antar daerah dan dunia usaha
5. Menerapkan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
6. Mengoptimalkan kualitas sumberdaya manusia
7. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi
8. Memanfaatkan terbukanya pasar global
9. Memanfaatkan deregulasi peraturan perundang-undangan dunia usaha

2.2. STRATEGI DAN PRIORITAS APBD 2003

Agar pencapaian tujuan tetap pada sasaran yang diinginkan di perlukan strategi dan prioritas melalui kebijakan antara lain sebagai berikut :

Strategi dan Prioritas Tahun 2003

1. Mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah melalui peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pemerintah dan peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah;
2. Menggali dan mengembangkan Sumber-sumber Pendapatan Daerah khususnya Pariwisata, Usaha Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah;
3. Menggali, memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah, khususnya : pertanian, kelautan dan industri;
4. Meningkatkan kerjasama antar daerah dan dunia usaha melalui pemberdayaan masyarakat, pemantapan kehidupan beragama, membuka peluang lapangan kerja serta pembinaan tradisi dan nilai-nilai budaya masyarakat;
5. Menerapkan perkembangan IPTEK untuk meningkatkan pelayanan publik melalui penerapan teknik industri penelitian dan pengkajian pendukung perencanaan pembangunan daerah;
6. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan, peningkatan derajat kesehatan dan sosial serta pendayagunaan sistem dan pengawasan;
7. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui

pengembangan usaha-usaha ekonomi yang didukung oleh stabilitas keamanan yang dinamis.

8. Memanfaatkan terbukanya pasar global melalui pengembangan produktivitas dan kesempatan kerja serta pengembangan perdagangan dan sistem distribusi.
9. Memanfaatkan Deregulasi Peraturan Perundang-undangan Dunia Usaha melalui Pengembangan Sistem Informasi.

2.3. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN DAN TARGET KINERJA

Untuk mensinergikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Tahun Anggaran 2003 telah ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Pemantapan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Kegiatan Pokok Program ini adalah melalui (1) Pembinaan Politik Daerah (2) Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Otoda.
2. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah
Kegiatan Pokok Program ini antara lain meliputi (1) Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (2) Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kebudayaan serta (3) Pendidikan Kedinasan.
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Pokok Program ini adalah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang dimaksudkan

untuk tersedianya gedung, sarana transportasi, perlengkapan rumah dinas, peralatan kantor dan penyediaan tanah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah.

4. Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Kegiatan Pokok Program ini antara lain meliputi (1) Pengembangan dan Pengelolaan Produk/Obyek Wisata (2) Penerimaan Pendapatan Daerah (3) Penyertaan Modal Pemerintah dan (4) Pengembangan Penanaman Modal

5. Pembinaan Kekayaan Daerah dan Perusahaan-Perusahaan Daerah

Kegiatan Pokok Program ini antara lain meliputi (1) Pengembangan Lembaga Keuangan (2) Pembinaan Kekayaan Daerah dan (3) Pembinaan Perusahaan-Perusahaan Daerah.

6. Pembangunan dan Pengembangan Usaha Pertanian, Industri dan Kelautan

Pokok Program pada Tahun Anggaran 2003 antara lain meliputi (1) Pengembangan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Menengah (2) Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri (3) Pengembangan Pertanian Rakyat, Peternakan Rakyat dan Perikanan Terpadu (4) Pengembangan Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan (5) Penataan Strukur Industri (6) Pengembangan

Usaha Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Hutan Rakyat (7) Diversifikasi Pangan dan Gizi (8) Pembangunan Pertambangan dan (9) Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan.

7. Pembangunan dan Pengembangan Infra Struktur
Kegiatan Pokok Program ini antara lain meliputi (1) Pengembangan Sumberdaya Air (2) Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku (3) Pengelolaan Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya (4) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi (5) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (6) Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan (7) Pembangunan Jalan dan Jembatan (8) Pengembangan Sistem Transportasi (9) Pembangunan dan Pengembangan Pelayanan Rakyat (10) Pembangunan Prasarana Perkotaan serta (11) Pembangunan Desa
8. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
Kegiatan Pokok Program ini antara lain meliputi (1) Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2) Penataan Ruang (3) Pembinaan Daerah Pantai (4) Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air (5) Rehabilitasi Lahan Kritis dan (6) Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.
9. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemantapan Kehidupan Beragama
Kegiatan Pokok Program ini pada Tahun Anggaran

2003 antara lain meliputi (1) Peningkatan Sarana Kehidupan Beragama (2) Pembinaan Pendidikan Agama (3) Pembinaan Keluarga dan KB serta (4) Pemberdayaan Wanita dan PKK.

10. Pembinaan Tradisi dan Nilai-Nilai Budaya

Kegiatan Pokok Program ini antara lain meliputi (1) Pembinaan Kebahasaan, Kesusastraan dan Kepustakaan (2) Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya (3) Pembinaan Kesenian (4) Pembinaan Tradisi Penggalan Sejarah dan Permusiuman (5) Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat serta (6) Pengembangan Sistem Informasi Geologi/Geografi

11. Peningkatan Pelayanan Masyarakat dan Pengembangan Teknik Produksi

Kegiatan Pokok Program ini antara lain meliputi (1) Pengembangan Listrik Pedesaan (2) Sistem Manajemen administrasi Kependudukan (3) Pembangunan dan Pengembangan Pertambangan Rakyat (4) Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan serta (5) Penerapan dan Pengembangan Teknik Produksi

12. Penelitian dan Pengkajian Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Pokok Program ini antara lain meliputi (1) Pengembangan Daerah Tingkat II (2) Perencanaan Pembangunan Daerah (3)

Pengkajian dan Penelitian Ilmu Pengetahuan Dasar dan Terapan (4) Penelitian Pendukung Perencanaan Pembangunan (5) Penelitian dan pengkajian Kebijakan

13. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan

Dengan kegiatan Pokok antara lain meliputi (1) Pembinaan Pendidikan Dasar (2) Pembinaan Pendidikan Menengah (3) Operasi dan Perawatan Fasilitas Pendidikan dan Kebudayaan serta (4) Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan.

14. Peningkatan Derajat Kesehatan dan Sosial

Kegiatan Pokok Program ini antara lain meliputi (1) Penyuluhan Kesehatan Masyarakat dan Perbaikan Gizi Masyarakat (2) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (3) Pelayanan Rujukan dan pengobatan Tradisional (4) Pelayanan Kesehatan Masyarakat (5) Operasi dan perawatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (6) Pengawasan Obat dan Makanan (7) Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Rumah sakit (8) Pembinaan Pengobatan Tradisional (9) Penyehatan Lingkungan Permukiman (10) Perbaikan Perumahan dan Permukiman (11) Pembangunan Permukiman dan Lingkungan (12) Penyediaan dan pengelolaan Sarana Air Bersih (13) Penanggulangan Bencana Alam (14) Pembinaan Kesejahteraan Sosial (15) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial serta (16) Pembinaan anak dan

Remaja

15. Pendayagunaan Sistem dan Pengawasan

Dengan kegiatan Pokok antara lain meliputi (1) Peningkatan Efisiensi dan pendayagunaan aparatur (2) Pendayagunaan Sistem Pengawasan serta (3) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pengawasan.

16. Pembinaan dan Pengembangan Usaha-Usaha Ekonomi

Kegiatan Pokok Program ini adalah melalui (1) Pembinaan dan Pengembangan Koperasi (2) Pengembangan Usaha dan Lembaga Perdagangan (3) Pembinaan Usaha Golongan Ekonomi Lemah serta (4) Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil

17. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Kegiatan Pokok Program ini antara lain meliputi (1) Penerapan dan Penegakkan Hukum (2) Pengembangan Jaringan dan Dokumentasi Hukum di Daerah (3) Pembinaan Kekuatan Rakyat dan (4) Kewilayahan

18. Pembinaan Pengembangan Produktivitas dan Kesempatan Kerja

Kegiatan Pokok Program ini antara lain meliputi (1) Pelatihan dan Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kerja (2) Pembinaan Hubungan Industri dan Perlindungan Tenaga Kerja serta (3)

Pengarahan dan Pembinaan Transmigrasi

19. Pengembangan Perdagangan dan Sistem Distribusi

Dengan kegiatan Pokok antara lain meliputi (1) Pengembangan Perdagangan dan Sistem Distribusi serta (2) Pembinaan dan Pengembangan Kerjasama

20. Pengembangan Sistem Informasi

Kegiatan Pokok Program ini pada Tahun Anggaran 2003 antara lain meliputi (1) Pengembangan Operasi Penerangan (2) Pembinaan dan Pengembangan Pers di Daerah (3) Pengembangan Sistem Informasi serta (4) Pengembangan Radio, Televisi dan Film

2.4. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DAN PENCAPAIAN KINERJA

Untuk mensinergikan antara tujuan, program dan kegiatan pada Renstra Daerah dengan Arah dan Kebijakan Umum serta Strategi dan Prioritas APBD yang disusun berdasarkan kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 maka dapat dikelompokkan dalam formulasi sebagai berikut :

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2003

1. Untuk mencapai terwujudnya peningkatan

keuangan daerah melalui pelaksanaan otonomi daerah, dengan mengoptimalkan penggalan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah, dapat diimplementasikan ke dalam 13 (tiga belas) Bidang Kewenangan meliputi Bidang Administrasi Umum Pemerintahan, Kepariwisata, Penanaman Modal, Perindustrian dan Perdagangan, bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan dan Perkebunan, Pertambangan dan Energi, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Bidang Permukiman.

2. Untuk mencapai terwujudnya peningkatan pelayanan masyarakat melalui kerjasama antar daerah dan dunia usaha, Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan deregulasi peraturan perundang-undang dunia usaha serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia, apabila di implemnetasikan ke dalam Bidang Kewenangan ada dalam 12 (dua belas) bidang kewenangan meliputi Bidang Kesehatan, Kependudukan, Ketenagakerjaan, Pendidikan dan Kebudayaan, Sosial, Pertambangan dan Energi, Perhubungan,

Administrasi Umum Pemerintahan, Olah Raga, Permukiman, Agama dan Bidang IPTEK.

3. Sedangkan untuk mencapai terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan pelaksanaan otonomi daerah dan memanfaatkan terbukanya pasar global, kerjasama antar daerah dan dunia usaha serta pesatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dapat di implementasikan ke dalam 7 (tujuh) Bidang Kewenangan meliputi Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Ketenagakerjaan, Kependudukan, Administrasi Umum Pemerintahan, Hukum serta Bidang Keamanan dan Ketertiban.

Sedangkan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian kinerja pada APBD Tahun Anggaran 2003 sesuai dengan pelaksanaan kewenangan Bidang Pemerintahan sebagaimana Pola yang dianut Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2003 melalui Penerapan sistem Anggaran kinerja yang disesuaikan dengan kelembagaan yang ada di Daerah maka kegiatan per bidang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Bidang Administrasi Umum Pemerintahan

Kegiatannya antara lain (1) Perencanaan, Pelaksanaan dan evaluasi Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah (2) Pembangunan Jaringan informasi Hukum (3) Penataan administrasi dan organisasi pemerintahan daerah (4) Penataan Ketatalaksanaan dan sistem perkantoran (5) Peningkatan Sistem Informasi jabatan (6) Pengembangan Budaya Kerja (7) Pembinaan Kehumasa (8) Peningkatan kegiatan dokumentasi / pameran (9) Pembinaan keprotokoleran dan pelayanan tamu-tamu dinas (10) Pemeliharaan RKPD (11) Pengendalian pembangunan daerah (12) Pembinaan administrasi proyek dan pemantauan penyusunan program pembangunan (13) Peningkatan sistem kinerja pelaksanaan proyek (14) Penyusunan pedoman pelaksanaan anggaran belanja daerah (15) Sosialisasi organisasi dan ketatalaksanaan (16) Kelancaran pelaksanaan program raskin (17) Sosialisasi produk perundang-undangan (18) Pembinaan penegakan peraturan daerah (19) Penyuluhan Hukum dan kadarkum (20) Penyusunan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (21) Fasilitator otonomi daerah (22) Pengendalian dan pemantauan pemilihan kepala desa (23) Penyelidik usulan

pemberhentian dan pemberhentian sementara kepala desa (24) Belanja Modal Sekretariat (25) Kegiatan PHBN (26) Kegiatan KORPRI (27) Kuasa Hukum (28) Kegiatan GOPTKI (29) Pembangunan tempat warkah Kantor BPN (30) Rehab gedung DPRD (31) Pengaspalan Halaman (32) Pendataan PBB dengan SISMIOP (33) Penyusunan Dokumen RIAP (34) Komputer (35) Pengadaan peta kabupaten (36) Penyusunan LDA dan IPM (37) SIM Jalan (38) Perencanaan umum (39) Sosialisasi Renstra (40) PDRB (41) Lamongan Menyingsing Fajar (42) LPJ (43) AKU dan Strategi dan Prioritas APBD (44) Identifikasi lokasi dan potensi kawasan tertinggal (45) Pembangunan Kota Mandiri (46) P2TPD (47) Sosialisasi PKS-BBM (48) Pembinaan dan peningkatan APIP (49) Pemantauan penyelenggaraan pelayanan publik (50) Peningkatan pengawasan pembangunan (51) Jasa Konsultan Restitusi Pph (52) Sensus Barang daerah (53) Pembinaan perbendaharaan (54) Evaluasi dan konsolidasi RASK (55) Penyusunan manual administrasi keuangan (56) Penyusunan sistem APBD dan pelatihan op (57) Pembuatan jaringan SPM (58) Implementasi akuntansi (59) Pembuatan dan penetapan DASK (60) Pengawasan dan

pembinaan GDO (61) Penyusunan APBD (62)
Penyusunan Laporan Perhitungan APBD (63)
Perubahan APBD (64) Analisa Cash Budget
dan penyusunan SKO (65) Peningkatan
komputerisasi kas daerah (66) Kendaraan
alat berat (67) Kendaraan angkutan darat
bermotor (68) Kendaraan angkutan darat
tidak bermotor (69) Alat kantor dan rumah
tangga (70) Alat studio (71) Alat
persenjataan (72) instalasi pabrik (73) alat
angkut apung (74) alat alaboratorium (75)
Pembinaan administrasi pemerintahan (76)
Pembinaan wilayah (77) POLRES (78) KODJM
(79) Bantuan org masyarakat (80) Bantuan
org profesi (81) Ujian dinas (82) Penyuluhan
dan pembinaan PNS (83) Diklat struktural
dan fungsional (84) Kader Wartekdes (85)
TOT Kader Posyandu (86) Pendataan data
profil desa (87) Diskusi UDKP (88) Lomba
desa (89) Asosiasi LPM (90) TTG (91) PKK
(92) P2WKSS (93) PMT-AS (94) Sosialisasi
HAM (95) (96) Forum fasilitasi LSM, ornas
(97) Pembinaan generasi muda di bidang
wasbang (98) bantuan insidentil orpol (99)
pembinaan kesbang dan masy rawan konflik
(100) monitoring Ipoleksosbud (101)
Pembinaan politik dalam negeri (102)
Bencana alam dan penanganan pengungsi

(103) Bantuan LSM (104) Bantuan Ormas dan kepemudaan (105) Bantuan Parpol (106) Bantuan KPU (107) Peningkatan kemampuan Linmas (108) Pengadaan perlengkapan linmas (109) Pembinaan dan pengadaan KORSIK (110) Gladi Posko 2003 (111) pembinaan pemerintahan desa (112) rehab bangunan/gedung kecamatan (113) bantuan Pilkades (114) Tunjangan penghasilan aparat pemdes (115) bantuan asuransi kepala desa (115) gedung veteran, LVRI, Minveter (116) Sistem kearsipan (117) Pelayanan Perpustakaan keliling (118) operasional perpustakaan umum (119) Operasi pengamanan (120) Latsar Pol PP (121) Pengembangan Sistem integrasi Database (122) Komputer (123) Sosialisasi penyuluhan dan pameran (124) Penerbitan leaflet perijinan (125) pembekalan petugas perijinan (126) pembuatan plat nomor IMB

2. Bidang Pertanian

Kegiatannya antara lain (1) Penangkaran benih padi (2) Pengembangan agro jagung (3) intensifikasi kedelai (4) Pengembangan PPL (5) Pengendalian hama tikus (6) SLPHT (7) Temu usaha petani produsen (8) penanganan pasca panen gabah (9) pengadaan pompa air (10) Pening mutu

intensifikasi pertanian (11) bantuan operasional pupuk maharani (12) sumur resapan (13) Pembuatan buku petunjuk umum intensifikasi pertanian (14) Masterplan komoditi pertanian

3. Bidang Perikanan dan Kelautan

Kegiatannya antara lain (1) Pengembangan sapi dan itik (2) Oper BBI Kalen (3) Pembuatan terumbu karang (4) Oprs POSKAMLA (5) Pendampingan PMKE (6) Pembuatan kandang sapi (7) Pendampingan PPMP (8) Pendamping kelompok agribisnis ternak (9) pengurusan sapi import (10) Opr Penggemukan sapi KUBE (11) Pemeliharaan sapi import (12) pembangunan irigasi

4. Bidang Pertambangan dan Energi

Kegiatannya antara lain (1) Pendampingan bantuan PLTS (2) Pendayagunaan potensi air bawah tanah

5. Bidang Kehutanan dan Perkebunan

Kegiatannya antara lain (1) Penghijauan (2) Pendamping bantuan bibit penghijauan

6. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Kegiatannya antara lain (1) Pelatihan ketrampilan (2) Pembinaan PKL (3) Uji coba alat batu bata (4) Identifikasi standart patent

produk lamongan (5) Bantuan Industri kecil
(6) Promosi dan potensi produksi daerah (7)
Pembangunan pasar desa (8) Pembangunan
pasar

7. Bidang Koperasi

Kegiatannya antara lain (1) Sosialisasi Audit
eksternal oleh KPA/KJA (2) Pemberdayaan
koperasi (3) Pemebrian modal kerja
ketahanan pangan (4) Pemebrian modal
simpan pinjam (5) Pengembangan Usaha
ekonomi (6) Bintek Perkoperasian (7)
Penuntasan tunggakan Kredit usaha tani
(KUT)

8. Bidang Penanaman Modal

Kegiatannya antara lain Pembinaan
perusahaan daerah

9. Bidang Ketenagakerjaan

Kegiatannya antara lain (1) Pelatihan
ketrampilan Naker (2) Penyuluhan dan
penanggulangan TKI Ilegal (3) Pengumpulan,
Penyebarluasan Informasi Naker (4)
Pembinaan dan pelaksanaan perlindungan
Naker (5) Pemberdayaan pendaftar Calon
Trans

10. Bidang Kesehatan

Kegiatannya antara lain (1.) Modal

Pembangunan Gedung dan Pengandaan
Komp (2) Peningk Gizi masyarakat (3)
Pengadaan vaksin (4) BIAS (5)
Pemberantasan penyakit menular (6) WSSLIC
(7) Peningk manajemen pengelolaan obat,
makanan (8) rehab puskesmas (9) peningk
kesehatan ibu dan anak (10) Bahan kimia lab
puskesmas (11) Obat-obatan puskesmas (12)
Posyandu (13) Makanan dan minuman pasien
puskesmas (14) Pemeliharaan Pusling (15)
Operasional AKPER (16) Operasional Gedung
Farmasi (17) Pengadaan alat kesehatan (18)
Pengadaan alat laboratorium (19) Pengadaan
Mobil ambulans (20) Modal alat kantor (21)
Bahan dan obat untuk penderita (22) Bahan
dan obat OPRS (23) Konsumsi Pasien (24)
Modal bangunan gedung (25) Modal alat
kesehatan (26) modal alat perkantoran (27)
Konsumsi Dokter jaga dan perawat (28)
UNICEF

11. Bidang Pendidikan dan kebudayaan

Kegiatannya antara lain (1) TOT bagi guru
olahraga (2) Pengembangan kebudayaan dan
kesenian (3) pemeliharaan dan
pembangunan gedung sekolah (4) alat kantor
(5) laboratorium sekolah (6) buku perpust (7)
Bantuan keuangan kepada sekolah dan
dewan sek (8) Kerjasama dengan Tek

Informatika dan akuntansi (9) Pembekalan materi bidang studi matemat SLTP (10) Pembekalan materi bidang studi PPKN SD (11) Seleksi persiapan POR SD (12) Pembinaan dan pengembangan seni budaya (13) pemberantasan buta huruf (14) Bantuan Ponpes (15) Pembinaan Pendidikan (16) Pembinaan Keagamaan (17) Pendidikan LPTQ (18) Bantuan kesejahteraan guru swasta di link Depag (19) Bantuan kesejahteraan guru TK (20) Bantuan kepada elmbaga keagamaan, dan tempat ibadah (21) Penelitian Ponpes

12. Bidang Sosial

Kegiatannya antara lain (1) Pembinaan WTS, rehabilitasi penyandang cacat (2) Pemeliharaan gedung liposos (3) Bantuan kepada Lansia dan org sosial (4) Sosialisasi pengurustamaan Gender (5) Sosialisasi keadilan dan kesetaraan gender (6) Sosialisasi Gerakan sayang ibu (7) Sosialisasi perlindungan terhadap tindak pidana kekerasan perempuan dan anak (8) Sosialisasi bahaya NAPSA (9) Seminar, lokakarya tentang pemberdayaan perempuan /organisasi perempuan (10) Pendidikan dan pelatihan kepada remaja, ibu rumah tangga panti asuhan dan ponpes (11) Pemberdayaan

perempuan (12) Yayasan PMI (13) Yayasan Kanker Indonesia (14) Bantuan kepedulian sosial

13. Bidang Penataan ruang

Kegiatannya antara lain (1) Penyusunan RTRK (2) Penataan wilayah pesisir dan laut (3) RUTRK (4) Masterplan pengelolaan SDA

14. Bidang Permukiman

Kegiatannya antara lain (1) Pembangunan gedung kantor CK dan Krbangunan (2) PJU (3) Bahan kebersihan (4) Proyek KIP (5) Pemeliharaan alon-alon (6) Pemeliharaan GOR, Stadion, lap tennis (7) Pemeliharaan alat berat (8) Pemeliharaan alat angkut (9) Peningk jalan lingkungan (10) Pembangunan saluran air perkampungan (11) Pemb stadion, alon-alon dan mushollah (12) Penghijauan taman alon-alon (13) Pemb TPA (14) Pemb gerobak sampah (15) alat kantor (16) Pemb Taman (17) Penataan Jalur Hijau (18) P2KP (19) PPK (20) TMMD (21) Gerdutaskin (22) P2MPD (23) Ronggohadi (24) Pembangunan desa/kelurahan (25) Pemberdayaan lingkungan

15. Bidang Pekerjaan Umum

Kegiatannya antara lain (1) Pemeliharaan

rutin jalan (2) Pemeliharaan rutin jembatan
(3) Pemeliharaan alat berat (4)
Pembangunan jalan (5) Pembangunan
jembatan (6) Pemeliharaan rutin jaringan
irigasi

16. Bidang Perhubungan

Kegiatannya antara lain (1) Sosialisasi UU
Perhubungan Laut (2) pengecatan marka
jalan (3) Penggantian papan jalan

17. Bidang Lingkungan Hidup

Kegiatannya antara lain (1) Pengelolaan
lingkungan hidup daerah (2) Program kali
bersih (3) Pengendalian dan pengelolaan
limbah (4) Pengendalian dampak lingkungan
bagi pejabat, tokoh masyarakat dan
perusahaan (5) Program pantai lestari (6)
Komisi penanggulangan pencemaran
lingkungan hidup (KPPLH) dan PPKN (7)
Penyusunan AMDAL dan usaha ekonomi
lemah

18. Bidang Kependudukan

Kegiatannya antara lain (1) Penyuluhan
tentang akta catatan sipil (2) rehab kantor
(3) SIMduk (4) Modal sarana kantor

19. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Kegiatannya antara lain (1) Kepramukaan (2)

- Keolahragaan (3) Kepemudaan dan kesenian
(4) KONI

20. Bidang Pariwisata

Kegiatannya antara lain (1) Promosi pariwisata (2) pemb pangkalan ngimbung, maharani (3) Pemb obyek wisata

21. Bidang Pertanahan

Kegiatannya antara lain (1) Pensertifikatan atanah (2) pengadaan tanah

BAB III

RINGKASAN REALISASI APBD 2003

3.1. REALISASI PENDAPATAN DAERAH

APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2003 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 dimana dari sisi Pendapatan Daerah dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 392.751.107.600,00 telah terealisasi sebesar Rp. 398.809.992.194,97 sehingga terjadi pelampauan dari target sebesar Rp. 6.058.884.594,97 atau tercapai sebesar 101,54 %.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2003 sebesar Rp. 398.809.992.194,97

Dari jumlah realisasi yang terjadi, hampir secara keseluruhan komponen pendapatan mengalami pelampauan dari target yang ditetapkan, kecuali pada komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah yang hanya mencapai sebesar 96,21 %. Sedangkan tingkat pencapaian kinerja yang paling tinggi berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang mampu mencapai realisasi sebesar 103,90 %, sebagaimana yang terlihat pada Tabel 1 dibawah ini :

Hampir secara keseluruhan komponen Pendapatan telah melampaui dari target

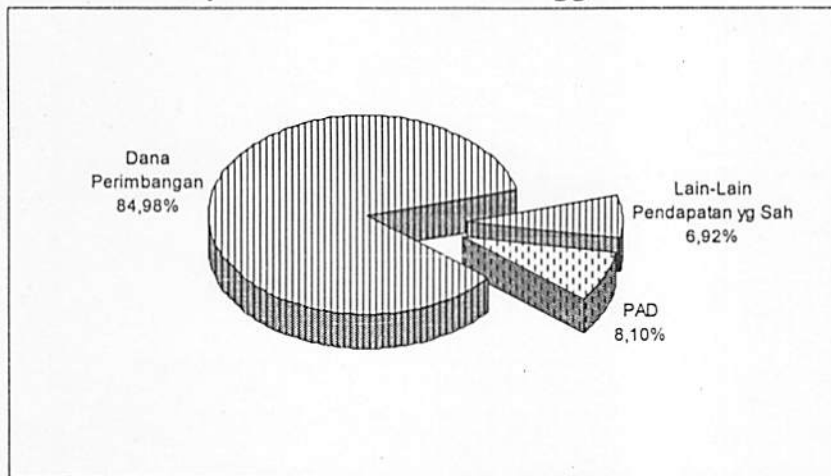
Tabel 1
Realisasi Komponen Pendapatan Daerah
Tahun 2003

No	Komponen Pendapatan	APBD 2003		%
		Target	Realisasi	
1	Pendapatan Asli Daerah	31.101.378.600,00	32.314.669.959,97	103,90%
2	Dana Perimbangan	332.957.139.000,00	338.891.246.827,00	101,78%
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	28.692.590.000,00	27.604.075.408,00	96,21%
	Jumlah Pendapatan Daerah	392.751.107.600,00	398.809.992.194,97	101,54%

Dari pencapaian kinerja diatas, apabila dilihat dari kontribusi masing-masing terhadap keseluruhan total realisasi Pendapatan Daerah dapat dilihat pada Grafik 2 dibawah ini :

*Kontribusi masing-masing
Pendapatan Daerah*

Grafik 2
Tingkat Kontribusi pencapaian realisasi per-komponen
Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2003



Tingkat kontribusi realisasi sebagaimana pada Target APBD masih berasal dari Dana Perimbangan yang mencapai kontribusi sebesar 84,96 % dari seluruh Pendapatan Daerah, dan dari PAD mampu mencapai kontribusi sebesar 8,10 % serta Lain-Lain Pendapatan Yang Sah mencapai sebesar 6,92 %.

*Kontribusi terbesar berasal
dari Dana Perimbangan*

Untuk mengetahui seluruh komponen Pendapatan Daerah secara rinci diuraikan sebagai berikut :

a. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Dari ketetapan sebesar Rp. 31.101.378.600,00 telah terealisasi sebesar Rp. 32.314.669.959,97 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 1.213.291.359,97 atau tercapai sebesar 103,90 %

*PAD terealisasi sebesar
103,90 %*

sebagaimana yang tertera dalam Tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2003

No.	Komponen PAD	APBD 2003		%
		Target	Realisasi	
1	Pajak Daerah	6.326.142.000,00	7.397.214.285,00	116,93%
2	Retribusi Daerah	7.568.664.600,00	7.631.831.297,00	100,83%
3	Bagian Laba BUMD	734.619.000,00	734.619.479,09	100,00%
4	Lain-Lain PAD Yang Sah	16.471.953.000,00	16.551.004.898,88	100,48%
	Jumlah PAD	31.101.378.600,00	32.314.669.959,97	103,90%

Dari kondisi realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

Dari bagian Pajak Daerah dari ketetapan sebesar Rp. 6.326.142.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 7.397.214.285,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 1.071.072.285,00 atau tercapai sebesar 116,93 %.

*Pajak Daerah terealisasi
116,93 %*

Dari masing-masing realisasi Pajak Daerah dijabarkan sebagai berikut :

Pajak Hotel dari ketetapan sebesar Rp. 8.040.000,00 telah terealisasi Rp. 8.171.500,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 131.500,00 atau tercapai sebesar 101,64 %.

*Pajak Hotel terealisasi
101,64 %*

Pencapaian realisasi tersebut diperoleh melalui peningkatan dan sosialisasi kepada wajib pajak disertai pendekatan yang persuasif.

Pajak Restoran dari Ketetapan sebesar Rp. 26.952.000,00 telah terealisasi sebesar

*Pajak restoran terealisasi
111,04 %*

Rp. 29.926.900,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 2.974.900,00 atau tercapai sebesar 111,04 %.

Pencapaian realisasi tersebut dilakukan melalui peningkatan kepada kesadaran para wajib pajak dengan menempatkan himbaun - himbauan kesadaran pembayaran pajak pada tempat - tempat tertentu.

Pajak Hiburan dari ketetapan sebesar Rp. 85.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 100.398.450,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 15.398.450,00 atau tercapai sebesar 118,12 %.

*Pajak Hiburan terealisasi
118,12 %*

Pencapaian realisasi tersebut sebagai implikasi dari peningkatan kegiatan hiburan terutama adanya penyelenggaraan sepak bola di stadion Surajaya.

Pajak Reklame dari ketetapan sebesar Rp.121.150.000,00 telah terealisasi Rp. 127.592.550,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 6.442.550,00 atau tercapai sebesar 105,32 %.

*Pajak Reklame terealisasi
105,32 %*

Pencapaian realisasi ini disamping menunjukkan kondisi dunia usaha yang semakin membaik juga merupakan hasil dari upaya intensifikasi melalui penjangkaran obyek dan subyek dalam rangka peningkatan dan pengembangan pendapatan daerah.

Pajak Penerangan Jalan dari ketetapan sebesar Rp.5.925.000.000,00 telah terealisasi

PPJ terealisasi 117,62 %

Rp. 6.969.076.585,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 1.044.076.585,00 atau tercapai sebesar 117,62 %.

Pelampauan pada target penerangan jalan ini seiring dengan meningkatkan konsumsi listrik masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam upaya meningkatkan keindahan kota Lamongan dan Kota Kecamatan-Kecamatan.

Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dari ketetapan sebesar Rp. 110.000.000,00 telah terealisasi Rp. 112.038.300,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 2.038.300,00 atau tercapai sebesar 101,85 %.

*Pajak Pengambilan dan
Pengolahan Bahan Galian
Golongan C terealisasi
101,85 %*

Berlebihnya penerimaan Pajak ini merupakan hasil intensifikasi yang dilakukan aparat pemungut yang didukung pula oleh kesadaran para wajib pajak.

Pajak Pengambilan Sarang Burung dari ketetapan sebesar Rp. 50.000.000,00 telah terealisasi Rp. 50.010.000,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 10.000,00 atau tercapai sebesar 100,02 %.

*Pajak Pengambilan Sarang
Burung terealisasi
100,02 %*

Dengan makin lebih diintensifkan penyuluhan mendorong kesadaran kepada para obyek pajak Pengambilan Sarang Burung memiliki kesadaran terhadap kewajibannya. Tercapainya realisasi ini juga dilakukan seiring dengan dilakukan peningkatan operasional pemungutan pada wajib pajak.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran 2003 ditetapkan sebesar Rp. 7.568.664.600,00 telah terealisasi Rp. 7.631.831.297,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 63.166.697,00 atau tercapai sebesar 100,83 %.

*Retribusi Daerah
terealisasi 100,83 %*

Dari masing-masing realisasi Retribusi Daerah dapat dijabarkan sebagai berikut :

Retribusi Pelayanan Kesehatan dari ketetapan sebesar Rp. 2.540.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 2.690.414.000,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 150.414.000,00 atau tercapai sebesar 105,92 %.

*Retribusi Pelayanan
Kesehatan
terealisasi 105,92 %*

Dari pencapaian tersebut, Retribusi Pelayanan Kesehatan dihasilkan oleh RSUD dengan realisasi mencapai sebesar Rp. 1.653.112.500,00 sedangkan Dinas Kesehatan realisasinya mencapai sebesar Rp. 1.037.301.500,00.

Pencapaian realisasi tersebut sebagai implikasi dari ditingkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan menambah sejumlah peralatan dan laboratorium baik di rumah sakit DR. Soegiri maupun di Puskesmas-Puskesmas.

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dari ketetapan sebesar Rp. 97.250.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 97.422.000,00 sehingga mengalami

*Retribusi Pelayanan
Persampahan / Kebersihan
terealisasi 100,18 %*

pelampauan dari target sebesar Rp. 172.000,00 atau tercapai sebesar 100,18 %.

Berlebihnya pencapaian realisasi ini disebabkan adanya kesadaran pada wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya serta intensifikasi melalui penyuluhan kepada wajib retribusi khususnya para pedagang di Pasar.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dari ketentuan sebesar Rp. 122.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 176.029.050,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 54.029.050,00 atau tercapai sebesar 144,29 %.

*Retribusi Penggantian
Biaya Cetak KTP terealisasi
144,29 %*

Tercapainya realisasi ini seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memiliki surat – surat kependudukan serta meningkatnya kualitas pelayanan dengan menyelenggarakan pelayanan KTP di tingkat Kecamatan.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan Sipil dari ketentuan sebesar Rp. 230.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 245.247.500,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 15.247.500,00 atau tercapai sebesar 106,63 %.

*Retribusi Penggantian
Biaya Cetak Akte Catatan
Sipil terealisasi 106,63 %*

Tercapainya realisasi ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kelahiran bayi dan meningkatnya kesadaran masyarakat.

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dari ketentuan

*Retribusi Parkir di Ta
Jalan Umum terealisasi
100 %*

sebesar Rp. 347.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 347.005.500,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 5.500,00 atau tercapai sebesar 100 %.

Secara keseluruhan hasil dari Retribusi ini merupakan hasil kerjasama pengelolaan parkir dengan pihak ketiga disamping adanya intensifikasi dari petugas lapangan

Retribusi Pasar dari ketetapan sebesar Rp. 1.154.312.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 1.159.581.150,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 5.269.150,00 atau tercapai sebesar 100,46 %.

*Retribusi Pasar terealisasi
100,46 %*

Berlebihnya pencapaian realisasi penerimaan ini menunjukkan kondisi ekonomi ditingkat bawah adanya peningkatan yang semakin menggembirakan walaupun secara keseluruhan hal tersebut tidak bisa dijadikan acuan bagi indikator perbaikan ekonomi, namun setidaknya memberikan gambaran yang lebih realistis kondisi ekonomi ditingkat mikro.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dari ketetapan sebesar Rp. 305.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 305.500.000,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 500.000,00 atau tercapai sebesar 100,16 %.

*Retribusi
Kendaraan
100,16 %*

*Pengujian
Bermotor*

Pencapaian realisasi tersebut didukung dengan adanya kegiatan operasi penertiban surat-surat yang dilaksanakan secara gabungan.

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dari ketetapan sebesar Rp. 8.500.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 8.500.500,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 500,00 atau tercapai sebesar 100,01 %.

*Retribusi Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran
terealisasi 100,01 %*

Pencapaian realisasi penerimaan ini diupayakan intensifikasi pemungutan khususnya ditujukan kepada Kantor – Kantor Pemerintahan dan perusahaan – perusahaan di Kabupaten Lamongan.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari ketetapan sebesar Rp. 685.551.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 691.636.526,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 6.085.526,00 atau tercapai sebesar 100,89 %.

*Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah
terealisasi 100,89 %*

Pencapaian realisasi ini dilakukan melalui pemungutan yang semakin intensif terhadap obyek-obyek serta dilakukan pendataan yang lebih kredibel terhadap aset-aset daerah.

Retribusi Pasar Grosir Bidang Perikanan dari ketetapan sebesar Rp. 500.500.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 334.842.340,00 sehingga kurang dari target sebesar Rp. 165.657.660,00 atau tercapai sebesar 66,90 %.

*Retribusi Pasar Grosir
Bidang Perikanan
terealisasi 66,90 %*

Tidak tercapainya target penerimaan ini disebabkan menurunnya tingkat hasil penangkapan ikan oleh Nelayan. Oleh sebab itu terhadap penurunan ini

Pemerintah Kabupaten Lamongan akan mengkaji lebih jauh terhadap faktor-faktor permasalahannya, apakah disebabkan adanya faktor cuaca, rusaknya habitat ikan, jumlah kapal yang beroperasi, harga BBM maupun turunnya jumlah nelayan di Kabupaten Lamongan.

Retribusi Terminal dari ketetapan sebesar Rp. 118.728.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 118.836.800,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 108.800,00 atau tercapai sebesar 100,09 %.

*Retribusi Terminal
teralisasi 100,09 %*

Tercapainya target penerimaan retribusi terminal ini disebabkan adanya operasional bus yang cukup stabil serta adanya upaya penjangkaran yang intensif pada wajib retribusi.

Retribusi Tempat Khusus Parkir dari ketetapan sebesar Rp. 107.323.600,00 telah terealisasi sebesar Rp. 87.380.350,00 sehingga terdapat kurang dari target sebesar Rp. 19.943.250,00 atau tercapai sebesar 81,42 %.

*Retribusi Tempat Khusus
Parkir terealisasi 81,42 %*

Tidak tercapainya realisasi penerimaan ini disebabkan tidak terealisasinya penerimaan Pangkalan Parkir Pasar Wisata Brondong. Untuk itu Pemerintah akan mengambil langkah-langkah dalam rangka pengelolaan parkir tersebut.

Retribusi Rumah Potong Hewan dari ketetapan sebesar Rp.45.000.000,00 telah terealisasi sebesar

*Retribusi Rumah Potong
Hewan 100, %*

Rp. 45.001.000,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 1.000,00 atau tercapai sebesar 100 %.

Realisasi penerimaan ini disebabkan adanya pengawasan yang intensif terhadap pemotongan hewan baik yang dilakukan didalam RPH maupun diluar RPH.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dari ketetapan sebesar Rp. 979.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 979.013.650,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 13.650,00 atau tercapai sebesar 100 %.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga terealisasi 100 %

Tercapai realisasi ini disebabkan meningkatnya kunjungan wisata di lokasi wisata di Kabupaten Lamongan khususnya Goa Maharani dan Makam Sunan Drajat.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari ketetapan sebesar Rp. 215.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 215.677.306,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 677.306,00 atau tercapai sebesar 100,32 %.

Retribusi IMB terealisasi 100,32 %

Berlebihnya penerimaan ini merupakan hasil upaya intensifikasi melalui penjaringan dan penyuluhan pada wajib retribusi.

Retribusi Izin Gangguan dari ketetapan sebesar Rp. 55.000.000,00 telah terealisasi sebesar

Retribusi Izin Gangguan terealisasi 129,47 %

Rp. 71.207.625,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 16.207.625,00 atau tercapai sebesar 129,47 %.

Berlebihnya penerimaan ini merupakan hasil upaya intensifikasi melalui penjangkaran dan penyuluhan kepada wajib retribusi.

Retribusi Izin Trayek dari ketetapan sebesar Rp. 16.500.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 16.536.000,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 36.000,00 atau tercapai sebesar 100,22 %.

*Retribusi Izin Trayek
teralisasi 100,22 %*

Berlebihnya realisasi penerimaan ini karena didukung adanya kegiatan operasi penertiban surat-surat kendaraan yang dilakukan secara gabungan dengan instansi terkait.

Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi dari ketetapan sebesar Rp. 42.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 42.000.000,00 sehingga tercapai sebesar 100 %.

*Retribusi Ijin Usaha Jasa
Kontruksi terealisasi
100 %*

Pencapaian realisasi ini dilakukan dengan melalui peningkatan pelayanan dengan Pelayanan Satu Atap.

3. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah

Untuk komponen ini dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 734.619.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 734.619.479,09 sehingga tercapai 100 %.

*Bagian Laba Perusahaan
Milik Daerah terealisasi
sebesar 100 %*

Ada 3 komponen dari jenis penerimaan ini yakni :

- 1) Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar terealisasi

sebesar Rp. 393.000.000,00 sehingga sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam Tahun 2002 PD Bank Pasar telah berhasil membukukan Laba Bersih perusahaan sebesar Rp. 393.000.000,00

- 2) Perusahaan Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya teralisasi sebesar Rp. 202.125.000,00 sehingga sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- 3) Bank Jatim telah terealisasi sebesar Rp. 139.494.479,09 sehingga tercapai 100 % yang disesuaikan dengan hasil RUPS Bank Jatim.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Penerimaan dari komponen ini dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 16.471.953.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 16.551.004.898,88 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 79.051.898,88 atau tercapai sebesar 100,48 %.

*Lain-Lain PAD Yang Sah
teralisasi 100,48 %*

Dari masing-masing komponennya dapat dirinci sebagai berikut :

Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan dari ketetapan sebesar Rp. 2.025.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 2.026.017.000,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 1.017.000,00 atau tercapai sebesar 100,05 %.

*Hasil penjualan aset
daerah terealisasi
100,05 %*

Berlebihnya penerimaan ini disebabkan terealisasinya pembangunan ruko-ruko di Kota Lamongan dan rest area.

Jasa Giro dari ketetapan sebesar Rp. 600.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp.1.557.305.187,52 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 957.305.187,52 atau tercapai sebesar 259,55 %.

*Jasa Giro terealisasi
259,55 %*

Tercapainya realisasi ini disebabkan meningkatnya kapasitas fiskal Pemerintah Kabupaten Lamongan sehingga posisi Kas terendah yang terjadi mampu memberikan peningkatan penerimaan ini.

Sumbangan Pihak Ketiga terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,00 sehingga sama dengan target.

Sumbangan Pihak Ketiga terealisasi 100 %

Pencapaian realisasi Sumbangan Pihak Ketiga merupakan kontribusi dari PT. Pelabuhan Rakyat Sedayulawas Kecamatan Brondong.

Penerimaan Bunga Deposito dari ketetapan sebesar Rp. 6.970.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 7.067.952.817,36 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 97.952.817,36 atau tercapai sebesar 101,41 %.

*Penerimaan Bunga Deposito terealisasi
101,41 %*

Berlebihnya penerimaan ini merupakan implikasi dari semakin meningkatnya kapasitas keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang dilakukan pemberdayaan dengan melalui pengaturan aliran kas pada setiap bulan yang dipengaruhi oleh pola-pola penerimaan dan pengeluaran serta penyimpanan sisa kas.

Penerimaan Usaha Dinas dari ketetapan sebesar

Penerimaan Usaha Dinas terealisasi 89,01 %

Rp. 5.347.883.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 4.760.231.450,00 sehingga kurang dari target sebesar Rp. 587.651.550,00 atau tercapai sebesar 89,01 %.

Tidak tercapainya realisasi Usaha Dinas berasal dari penerimaan pengelolaan ternak itik dan Pengembangan sapi Kereman.

Penerimaan Lain-Lain dari ketetapan sebesar Rp. 1.514.070.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 1.124.498.444,00 sehingga kurang dari target sebesar Rp. 389.571.556,00 atau tercapai sebesar 74,27 %.

*Penerimaan Lain-Lain
teralisasi 74,27 %*

Tidak tercapainya realisasi ini berasal dari target penerimaan pengelolaan Pabrik Es, oleh karena itu akan dilakukan pengalihan pada pihak lain yang lebih baik. Sedangkan kekurangannya akan tetap di perhitungkan tahun 2004.

b. DANA PERIMBANGAN

Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam Tahun Anggaran 2003 dari Penerimaan Dana Perimbangan secara keseluruhan dari target sebesar Rp. 332.957.139.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 338.891.246.827,00 sehingga melampaui dari target sebesar Rp. 5.934.107.827,00 atau tercapai sebesar 101,78 % sebagaimana tertera pada Tabel 3 dibawah ini :

*Dana Perimbangan
teralisasi 101,78 %*

Tabel 3
Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2003

No.	Komponen Dana Perimbangan	APBD 2003		%
		Target	Realisasi	
1	Bagi Hasil Pajak	16.482.575.000,00	18.903.661.363,00	114,69 %
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	1.380.153.000,00	1.210.321.065,00	87,69%
3	Dana Alokasi Umum	296.740.000.000,00	296.740.000.000,00	100,00%
4	Dan Alokasi Khusus	6.300.000.000,00	6.300.000.000,00	100,00%
5	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	12.054.411.000,00	15.737.264.399,00	130,55%
	Jumlah Dana Perimbangan	332.957.139.000,00	338.891.246.827,00	101,78%

Tercapainya realisasi tersebut disamping menunjukkan kinerja keuangan pemerintah yang semakin membaik, juga ditopang oleh upaya – upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mengintensifikasi pemungutan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan.

Sedangkan untuk realisasi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang merupakan komponen utama menunjukkan realisasi yang konsisten ketetapannya.

Untuk Dana Perimbangan dari Propinsi juga semakin menunjukkan realisasi yang semakin baik, dari alokasi yang ditetapkan sebesar Rp. 12.054.411.000,00 telah tercapai realisasi sebesar Rp. 15.737.264.399,00 sehingga melampaui dari target sebesar Rp. 3.682.853.399,00 atau tercapai sebesar 130,55 %. Namun demikian di sektor penerimaan Bagi Hasil Penerimaan, Bagi Hasil Bukan Pajak khususnya bagi hasil sumber daya alam beberapa komponen mengalami kurang dari target, hal ini disebabkan beberapa faktor :

*Kinerja Keuangan
Pemerintah mendorong
pencapaian realisasi yang
semakin membaik*

beberapa faktor :

- 1) Adanya penyesuaian terhadap produksi hasil minyak bumi dan gas alam yang kurang dari target produksi di Tahun 2003 akibat dari beberapa ladang gas alam yang tidak beroperasi.
- 2) Tuntutan sejumlah Pemerintah Daerah yang memiliki objek Sumber Daya Alam agar Pemerintah Pusat menaikkan kuota bagi hasilnya.

c. LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH

Dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 28.692.590.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 27.604.075.408,00 sehingga kurang dari target sebesar Rp. 1.088.514.592,00 atau tercapai sebesar 96,21 % sebagaimana yang tertera pada tabel 4 dibawah ini :

*Lain-Lain
Yang Sah
96,21 %* *Penerimaan
teralisasi*

Tabel 4
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2003

No.	Komponen Lain-Lain Pendapatan yg sah	APBD 2003		%
		Target	Realisasi	
1	Bantuan Dana Kontijensi/ Penyeimbang dari Pemerintah	23.892.590.000,00	22.713.629.252,00	95,07%
2	Penerimaan Restitusi PPH 21	4.800.000.000,00	4.890.446.156,00	101,88%
	Jumlah	28.692.590.000,00	27.604.075.408,00	96,21%

Tidak tercapainya realisasi komponen penerimaan ini disebabkan tingkat realisasi dari Dana Kontijensi / Dana Penyeimbang yang mencapai sebesar 95,07 % yang disesuaikan dengan realisasi jumlah penambahan pegawai baru.

*Dana Kontijensi terealisasi
95,07 %*

3.2. REALISASI BELANJA DAERAH

Pada sisi Belanja Daerah secara keseluruhan didalam Tahun Anggaran 2003 dialokasikan sebesar Rp. 412.676.522.500,00 pada pelaksanaannya telah terealisasi sebesar Rp. 388.427.177.978,00 sehingga terdapat sisa dana Rp. 24.249.344.522,00 atau tercapai sebesar 94,12 % sebagaimana yang tertera pada Tabel 5 dibawah ini :

Tabel 5
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2003

No.	Uraian Belanja Daerah	APBD 2003		%
		Alokasi	Realisasi	
A	<u>Belanja Aparatur</u>	<u>114.923.371.000,00</u>	<u>106.454.647.508,00</u>	<u>92,63%</u>
1	Belanja Administrasi Umum	79.753.209.000,00	71.877.853.291,00	90,13%
2	Belanja Operasi dan pemeliharaan	8.614.024.000,00	8.127.632.517,00	94,35%
3	Belanja Modal	26.556.138.000,00	26.449.161.700,00	99,60%
B	<u>Belanja Pelayanan Publik</u>	<u>297.753.151.500,00</u>	<u>281.972.530.470,00</u>	<u>94,70%</u>
1	Belanja Administrasi Umum	186.375.556.000,00	173.419.053.803,00	93,05%
2	Belanja Operasi dan pemeliharaan	29.963.712.000,00	29.696.079.627,00	98,71%
3	Belanja Modal	38.286.106.000,00	38.148.353.876,00	99,64%
4	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	39.712.777.500,00	39.393.679.164,00	99,20%
5	Belanja Tidak Tersangka	3.415.000.000,00	1.315.364.000,00	42,03%
	Jumlah Belanja Daerah	412.676.522.500,00	388.427.177.978,00	94,12%

Dari realisasi secara keseluruhan tersebut untuk masing-masing realisasi komponen Belanja Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Belanja Aparatur Daerah

Dari kelompok Belanja Aparatur Daerah yang dialokasikan sebesar Rp. 114.923.371.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 106.454.647.008,00 sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 8.468.723.492,00 atau

Belanja Aparatur Daerah terealisasi 92,63 %

92,63 % sebagaimana tertera pada tabel 6 dibawah ini :

Tabel 6
Realisasi Belanja Aparatur Daerah

No.	Uraian Belanja Aparatur Daerah	APBD 2003		%
		Alokasi	Realisasi	
a	<u>Belanja Administrasi Umum</u>	<u>79.753.209.000,00</u>	<u>71.877.853.291,00</u>	<u>90,13%</u>
1	Belanja Pegawai / Personalia	68.048.436.500,00	60.781.207.243,00	89,32%
2	Belanja Barang dan Jasa	7.207.114.500,00	6.822.468.719,00	94,66%
3	Belanja Perjalanan Dinas	1.290.230.000,00	1.215.371.999,00	94,20%
4	Belanja Pemeliharaan	3.207.428.000,00	3.058.805.330,00	95,37%
b	<u>Belanja Operasi dan pemeliharaan</u>	<u>8.614.024.000,00</u>	<u>8.127.632.517,00</u>	<u>94,35%</u>
1	Belanja Pegawai / Personalia	2.270.411.250,00	2.218.758.800,00	97,72%
2	Belanja Barang dan Jasa	5.726.545.750,00	5.307.198.717,00	92,68%
3	Belanja Perjalanan Dinas	350.669.000,00	337.689.000,00	96,30%
4	Belanja Pemeliharaan	266.398.000,00	263.986.000,00	99,09%
c	<u>Belanja Modal</u>	<u>26.556.138.000,00</u>	<u>26.449.161.700,00</u>	<u>99,60%</u>
	Jumlah Belanja Daerah	114.923.371.000,00	106.454.647.508,00	92,63%

Dari kelompok Belanja Aparatur Daerah diuraikan menjadi beberapa bagian belanja yakni :

Belanja Administrasi Umum pada kelompok Belanja Aparatur yang dialokasikan sebesar Rp.79.753.209.000,00 terealisasi sebesar Rp.71.877.853.291,00 sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 7.875.355.709,00 atau tercapai realisasi sebesar 90,13 %. Sisa lebih belanja ini sebagian besar berasal dari Belanja pegawai yang disesuaikan dengan jumlah pembayaran gaji pegawai selama kurun Tahun 2003.

*Belanja Administrasi Umum
terrealisasi 90,13%*

Belanja Operasional dan Pemeliharaan pada kelompok Belanja Aparatur yang dialokasikan sebesar yang dialokasikan sebesar Rp. 8.614.024.000,00 terealisasi

*Belanja Operasional dan
Pemeliharaan terealisasi
94,35 %*

sebesar Rp. 8.127.632.517,00 sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 486.391.483,00 atau tercapai realisasi sebesar 94,35 %. Sisa lebih belanja ini merupakan sisa anggaran kegiatan aparatur yang tidak dipergunakan dengan menyesuaikan kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

Belanja Modal pada kelompok Belanja Aparatur yang dialokasikan sebesar Rp. 26.556.138.000,00 terealisasi sebesar Rp. 26.449.161.700,00 sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 106.976.300,00 atau tercapai realisasi sebesar 99,60 %. Sisa lebih belanja ini merupakan penyesuaian dari kebutuhan belanja yang disesuaikan dengan harga yang berlaku atau harga pasar dari ketetapan harga yang dianggarkan.

Belanja Modal terealisasi 99,60 %

b. Belanja Pelayanan Publik

Dari kelompok Belanja Pelayanan Publik yang dialokasikan sebesar Rp. 297.753.151.500,00 telah terealisasi sebesar Rp. 281.972.530.470,00 sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 15.780.621.030,00 atau tercapai sebesar 94,70 % sebagaimana yang tertera dalam Tabel 7 dibawah ini :

Belanja Pelayanan Publik terealisasi 9,70 %

Tabel 7
Realisasi Belanja Pelayanan Publik

No.	Uraian Belanja Pelayanan Publik	APBD 2003		%
		Alokasi	Realisasi	
a	<u>Belanja Administrasi Umum</u>	<u>186.375.556.000,00</u>	<u>173.419.053.803,00</u>	<u>93,05%</u>
1	Belanja Pegawai / Personalia	174.350.707.000,00	161.893.385.807,00	92,86%
2	Belanja Barang dan Jasa	7.761.689.000,00	7.287.243.837,00	93,89%
3	Belanja Perjalanan Dinas	2.270.377.000,00	2.268.730.600,00	99,93%
4	Belanja Pemeliharaan	1.992.783.000,00	1.969.693.559,00	98,84%
b	<u>Belanja Operasi dan pemeliharaan</u>	<u>29.963.712.000,00</u>	<u>29.696.079.627,00</u>	<u>98,71%</u>
1.	Belanja Pegawai / Personalia	885.445.000,00	853.585.000,00	96,40%
2	Belanja Barang dan Jasa	11.989.037.500,00	11.867.876.827,00	97,99%
3	Belanja Perjalanan Dinas	431.032.000,00	391.897.000,00	90,92%
4	Belanja Pemeliharaan	16.658.197.500,00	16.582.720.800,00	99,55%
c	<u>Belanja Modal</u>	<u>38.286.106.000,00</u>	<u>38.148.353.876,00</u>	<u>99,64%</u>
d	<u>Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan</u>	<u>39.712.777.500,00</u>	<u>39.393.679.164,00</u>	<u>99,20%</u>
e	<u>Belanja Tidak tersangka</u>	<u>3.415.000.000,00</u>	<u>1.315.364.000,00</u>	<u>42,03%</u>
	Jumlah Belanja Pelayanan Publik	297.753.151.500,00	281.972.530.470,00	94,70%

Dari Kelompok Belanja Pelayanan Publik diuraikan menjadi beberapa bagian belanja yakni :

Belanja Administrasi Umum pada kelompok Belanja Pelayanan Publik dialokasikan Rp.186.375..556.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 173.419.053.803,00 sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 12.956.502.197,00 atau tercapai realisasi sebesar *93,05 %*.

*Belanja Administrasi Umum
teralisasi 93,05 %*

Belanja Operasional dan Pemeliharaan pada kelompok Belanja Pelayanan Publik dialokasikan sebesar Rp. 29.963.712.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 29.696.079.627,00 sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 267.632.373,00 atau tercapai realisasi sebesar *98,71 %*.

*Belanja Operasional dan
Pemeliharaan terealisasi
98,71 %*

Belanja Modal dialokasikan pada kelompok Belanja Pelayanan Publik sebesar Rp. 38.286.106.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 38.148.353.876,00 sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 137.752.124,00 atau tercapai realisasi sebesar 99,64 %.

*Belanja Modal terealisasi
99,64 %*

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dialokasikan sebesar Rp. 39.712.777.500,00 telah terealisasi sebesar Rp. 39.393.679.164,00 sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 319.098.336,00 atau tercapai realisasi 99,20 %.

*Belanja Bagi Hasil dan
Bantuan Keuangan terealisasi
99,20 %*

Belanja Tidak Tersangka dialokasikan sebesar Rp. 3.415.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 1.315.364.000,00 sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 2.099.636.000,00 atau tercapai realisasi sebesar 42,03 %.

*Belanja Tidak Tersangka
terealisasi 42,03 %*

3.3. REALISASI PEMBIAYAAN

Komponen pembiayaan merupakan kelompok anggaran yang merupakan sarana kebijakan pemerintah dalam menyikapi fiskal yang terjadi. Dalam perjalanan anggaran maka realisasi dari pembiayaan dapat dilihat pada tabel 8 dibawah ini :

*Pembiayaan merupakan
sarana kebijakan fiskal*

Tabel 8
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2003

No.	Uraian Pembiayaan Daerah	APBD 2003		%
		Target	Realisasi	
A	<u>Penerimaan Daerah</u>	<u>39.711.033.769,59</u>	<u>39.711.033.769,59</u>	<u>100,00%</u>
1	SILPA Tahun Lalu	39.711.033.769,59	39.711.033.769,59	100,00%
B	<u>Pengeluaran Daerah</u>	<u>19.785.618.869,59</u>	<u>50.133.847.986,56</u>	<u>253,39%</u>
1	Transfer ke Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00%
2	Investasi Saham	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00%
3	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	41.583.200,00	41.583.200,00	100,00%
4	SILPA tahun berjalan	244.035.669,59	30.552.264.786,56	12535,98%
	Jumlah Pembiayaan Daerah	19.925.414.900,00	(10.382.814.216,97)	(52,31%)

Dari masing-masing komponen diuraian sebagai berikut :

Penerimaan pembiayaan yang alokasinya dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu yang dialokasikan Rp. 39.711.033.769,59 terealisasi sebesar Rp. 39.711.033.769,59. Pencapaian realisasi ini merupakan penyesuaian dari ketetapan sisa lebih perhitungan Tahun 2002 sesuai dengan ketetapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sisa Lebih Perhitungan Tahun 2002.

*Penerimaan
teralisasi 100 %* *Pembiayaan*

Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan yang secara keseluruhan dialokasikan sebesar Rp. 19.785.618.869,59 telah terealisasi sebagai berikut :

*Pengeluaran
teralisasi 253,39 %* *Pembiayaan*

- a. Transfer ke Dana Cadangan sebesar
Rp. 15.000.000.000,00
- b. Penyertaan modal sebesar Rp. 4.500.000.000,00
- c. Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo
Rp. 41.583.200,00

- d. Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun berjalan sebesar Rp. 30.552.264.786,56 yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2003.

3.4. POSISI DANA CADANGAN

Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Lamongan dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 yang dialokasikan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 yang penganggarannya dilakukan selama 2 tahun anggaran yakni Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003. Sedangkan penggunaannya diarahkan untuk proyek-proyek yang berskala besar dan sangat prioritas utamanya dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dana Cadangan dibentuk melalui Perda Nomor 5 Tahun 2002

Dalam Perjalanan Anggaran selama kurun waktu 2 tahun anggaran, maka posisi Dana Cadangan terakhir (saldo Akhir) menjadi sebesar Rp. 30.000.000.000,00, sebagaimana yang tertera didalam Tabel 9 dibawah ini :

Saldo Akhir Dana Cadangan sebesar Rp. 30.000.000.000,-

Tabel 9
Posisi Dana Cadangan Tahun Anggaran 2003

Tahun Mulai Dana Cadangan	Posisi Dana Cadangan		Saldo Akhir Tanggal 31 - 12 - 2003
	Tanggal 31 - 12 - 2002	Tanggal 31 - 12 - 2003	
2002	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	30.000.000.000,00

- d. Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun berjalan sebesar Rp. 30.552.264.786,56 yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2003.

3.4. POSISI DANA CADANGAN

Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Lamongan dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 yang dialokasikan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 yang penganggarannya dilakukan selama 2 tahun anggaran yakni Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003. Sedangkan penggunaannya diarahkan untuk proyek-proyek yang berskala besar dan sangat prioritas utamanya dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dana Cadangan dibentuk melalui Perda Nomor 5 Tahun 2002

Dalam Perjalanan Anggaran selama kurun waktu 2 tahun anggaran, maka posisi Dana Cadangan terakhir (saldo Akhir) menjadi sebesar Rp. 30.000.000.000,00, sebagaimana yang tertera didalam Tabel 9 dibawah ini :

Saldo Akhir Dana Cadangan sebesar Rp. 30.000.000.000,-

Tabel 9
Posisi Dana Cadangan Tahun Anggaran 2003

Tahun Mulai Dana Cadangan	Posisi Dana Cadangan		Saldo Akhir Tanggal 31 - 12 - 2003
	Tanggal 31 - 12 - 2002	Tanggal 31 - 12 - 2003	
2002	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	30.000.000.000,00

BAB IV PENUTUP

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2003 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003, dan dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003. sesuai dengan penetapan tersebut maka APBD Kabupaten Lamongan menunjukkan angka-angka sebagai berikut :

*Ketetapan APBD dan
Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2003*

1. Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar
Rp. 392.751.107.600,00
2. Belanja Daerah dialokasikan sebesar
Rp. 412.676.522.500,00
3. Defisit yang terjadi Rp. 19.925.414.900,00
4. Pembiayaan dialokasikan sebesar
Rp. 19.925.414.900,00

Atas kebijakan dan kondisi fiskal yang ditetapkan tersebut diatas, setelah dilakukan perhitungan berdasarkan realisasinya menunjukkan angka-angka sebagai berikut :

*Realisasi APBD Tahun
Anggaran 2003*

1. Pendapatan Daerah tercapai realisasi sebesar
Rp. 398.809.992.194,97
2. Belanja Daerah terealisasi sebesar
Rp. 388.427.177.978,00
3. Sehingga apabila dibandingkan dengan
perencanaan APBD maka didalam Perhitungan

APBD Tahun Anggaran 2003 terjadi surplus sebesar Rp. 10.382.814.216,97.

4. Sedangkan disisi pembiayaan dari penerimaan tercapai realisasi sebesar Rp. 39.711.033.769,59 sedangkan disisi pengeluaran pembiayaan secara keseluruhan mencapai sebesar Rp. 50.093.847.986,56.

LAPORAN ALIRAN KAS

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
LAPORAN ALIRAN KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003

<u>Aliran Kas dari Aktivitas Operasi</u>		
Aliran Kas Masuk		
Pendapatan Asli Daerah		
Pajak Daerah	7.397.214.285,00	
Retribusi Daerah	7.631.831.297,00	
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil	734.619.479,09	
Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan		
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	16.551.004.898,88	
Pendapatan Dana Perimbangan		
Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak	20.113.982.428,00	
Dana Alokasi Umum (DAU)	296.740.000.000,00	
Dana Alokasi Khusus (DAK)	6.300.000.000,00	
Dana Perimbangan dari Propinsi	15.737.264.399,00	
Lain-lain Pendapatan yang Sah	27.604.075.408,00	
Jumlah	398.809.992.194,97	
Aliran Kas Keluar		
Belanja Adm. Umum, Operasi & Pemeliharaan		
Belanja Pegawai / Personalia	222.674.593.050,00	
Belanja Barang dan Jasa	14.229.712.556,00	
Belanja Perjalanan Dinas	3.484.102.599,00	
Belanja Pemeliharaan	5.028.498.889,00	
Belanja Operasi dan Pemeliharaan	37.703.712.144,00	
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	39.393.679.164,00	
Belanja Tidak Tersangka	1.315.364.000,00	
Jumlah	323.829.662.402,00	
Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		74.980.329.792,97
<u>Aliran Kas dari Aktivitas Investasi</u>		
Aliran Kas Keluar		
Belanja Modal		
Belanja Asset Tetap Aparatur	26.449.516.200,00	
Belanja Asset Tetap Publik	38.147.999.376,00	
Investasi Saham	4.500.000.000,00	
Jumlah	69.097.515.576,00	

Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(69.097.515.576,00)
<u>Aliran Kas dari Aktivitas Pembiayaan</u>		
Aliran Kas Keluar		
Pembayrn Pokok Pinjaman kpd Pemerith Pusat	41.583.200,00	
Transfer ke Dana Cadangan	15.000.000.000,00	
Jumlah	15.041.583.200,00	
Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		(15.041.583.200,00)
<u>Aliran Kas dari Aktivitas Non Anggaran</u>		
Aliran Kas Masuk		
Penerimaan	27.174.395.436,00	
Aliran Kas Keluar		
Pengeluaran	26.400.506.936,00	
Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (akumulasi s/d tahun 2003)		773.888.500,00
Aliran Kas Bersih selama Periode		(8.384.880.483,03)
Saldo Awal Kas (setelah penyesuaian)		39.711.033.769,59
Saldo Akhir Kas (termasuk Kas di PK)		31.326.153.286,56

NERACA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

N E R A C A

PER 31 DESEMBER 2003

URAIAN	CATATAN	2003	2002
AKTIVA			
AKTIVA LANCAR			
Kas di Kas Daerah	4	31.263.733.156,56	40.195.817.298,59
Kas di Pemegang Kas	4	62.420.130,00	-
Piutang Pajak	5	5.831.300,00	4.700.100,00
Piutang Lain-lain	6	1.330.447.268,00	1.223.956.200,00
Persediaan Bahan Pakai Habis / Material	7	2.208.353.464,50	1.842.044.478,00
Jumlah Aktiva Lancar		34.870.785.319,06	43.266.518.076,59
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi dalam Saham	8	16.060.174.092,00	11.501.174.092,00
Pinjaman pada Instansi	9	18.000.000,00	309.517.268,00
Penyertaan Dalam Proyek Pembangunan	10	3.349.771.300,00	2.304.951.300,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		19.427.945.392,00	14.115.642.660,00
AKTIVA TETAP	11		
Tanah		1.472.180.100.880,00	542.440.839.323,00
Jalan dan Jembatan		603.110.588.700,00	109.600.458.012,00
Bangunan Air (Irigasi)		106.086.216.000,00	180.313.362.451,00
Bangunan Gedung		213.893.997.000,00	124.003.790.422,00
Peralatan dan Mesin		13.069.020.651,00	7.582.094.680,00
Alat Angkutan		26.098.579.005,00	13.769.449.865,00
Perpustakaan		4.800.999.915,00	1.732.992.105,00
Meubelair dan Perlengkapan		20.749.230.178,00	16.425.345.170,00
Instalansi dan Jaringan		3.523.304.317,00	1.535.690.050,00
Aktiva Tetap Lainnya		3.863.320.994,00	24.654.671.925,00
Jumlah Aktiva Tetap		2.467.375.357.640,00	1.022.058.694.003,00
DANA CADANGAN	12		
		30.000.000.000,00	15.000.000.000,00
TOTAL AKTIVA		2.551.674.088.351,06	1.094.440.854.739,59
UTANG			
UTANG JANGKA PENDEK			
Bagian Lanca- Utang Jangka Panjang	13	83.243.545,49	87.618.158,62
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	14	773.888.500,00	484.783.529,00
Jumlah Utang Jangka Pendek		857.132.045,49	572.401.687,62
UTANG JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri	15	523.853.491,85	607.263.178,72
Jumlah Utang Jangka Panjang		523.853.491,85	607.263.178,72
TOTAL UTANG		1.380.985.537,34	1.179.664.866,34

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

NERACA

PER 31 DESEMBER 2003

URAIAN	CATATAN	2003	2002
EKUITAS DANA			
EKUITAS DANA UMUM			
Ekuitas Dana Lancar	16		
SILPA Tahun Pelaporan		31.326.153.286,56	40.195.817.298,59
Cadangan untuk Piutang		1.336.278.568,00	1.228.656.300,00
Cadangan untuk Persediaan		2.208.353.464,50	1.842.044.478,00
Dana utk pembay. Hutang Jangka Pendek		(857.132.045,49)	(572.401.687,62)
Ekuitas Dana yang Diinvestasikan	17		
Diinvestasikan dlm Investasi Jk. Panjang		19.427.945.392,00	14.115.642.660,00
Diinvestasikan dlm Aktiva Tetap		2.467.375.357.640,00	1.022.058.694.003,00
Diinvestasikan utk pemby. Ht Jk. Panjang		(523.853.491,85)	(607.263.178,72)
Total Ekuitas Dana Umum		2.520.293.102.813,72	1.078.261.189.873,25
EKUITAS DANA DICADANGKAN		30.000.000.000,00	15.000.000.000,00
TOTAL EKUITAS		2.550.293.102.813,72	1.093.261.189.873,25
TOTAL UTANG DAN EKUITAS DANA		2.551.674.088.351,06	1.094.440.854.739,59

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Umum

Laporan keuangan tahun 2003 adalah laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang disusun dari sebuah proses akuntansi *double entry*. Dengan proses akuntansi *double entry* tersebut laporan keuangan ini telah berhasil menampilkan komponen-komponen laporan keuangan pemerintah seperti disyaratkan dalam berbagai peraturan perundangan terkait, khususnya PP 105 tahun 2000 dan Kepmendagri 29 tahun 2002, yang terdiri atas :

- Neraca
- Laporan Perhitungan APBD
- Nota Perhitungan APBD
- Laporan Aliran Kas
- Catatan Atas Laporan Keuangan

Berbeda dengan tahun sebelumnya, adanya neraca yang andal (*reliable*) di laporan keuangan tahun 2003 ini mampu memberikan informasi yang komprehensif tentang keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan seperti posisi kas, piutang, aset daerah, dan hutang secara bersamaan. Adanya informasi yang komprehensif tersebut diharapkan dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan, baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal seperti investor atau kreditor.

Untuk memberikan informasi tentang perkembangan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam satu tahun terakhir maka disajikan pula tahun 2002. Namun demikian, perlu diketahui bahwa neraca 2002 merupakan konversi dari data-data pembukuan metode akuntansi yang lama (*single entry*). Dengan demikian, informasi keuangan dalam neraca 2002 mempunyai kelemahan dalam keandalannya (khususnya aktiva tetap) meskipun secara keseluruhan masih dapat digunakan sebagai acuan.

Untuk meningkatkan keandalan informasi keuangan neraca, telah dilakukan penilaian aktiva tetap (*appraisal*) di tahun 2003 yang hasilnya dijelaskan pada catatan 11.

Dalam membaca laporan keuangan 2003 ini diharapkan terdapat pemahaman adanya hubungan yang erat di antara komponen-komponen laporan keuangan. Dalam hal ini laporan perhitungan dan laporan aliran kas merupakan penjelasan atas perubahan posisi keuangan yang tergambar di neraca 2002 dan 2003. Selain itu, nota perhitungan APBD dan catatan atas laporan keuangan diharapkan dibaca sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dengan komponen laporan keuangan lainnya.

2. Perubahan dan Realisasi Anggaran

Ikhtisar perubahan dan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk tahun anggaran 2003 adalah sebagai berikut :

1). Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 :

a. Pendapatan	Rp. 398.809.992.194,97	
b. Belanja	<u>Rp. 388.427.177.978,00</u>	
Surplus		Rp. 10.382.814.216,97
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 39.711.033.769,59	
- Pengeluaran	<u>Rp. 50.093.847.986,56</u>	
Defisit		Rp. 10.382.814.216,97

2). Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.6.058.884.594,97 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp.392.751.107.600,00	
b. Realisasi	<u>Rp.398.809.992.194,97</u>	
Selisih Lebih		Rp. 6.058.884.594,97

3). Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.24.249.344.522,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp.412.676.522.500,00	
b. Realisasi	<u>Rp.388.427.177.978,00</u>	
Selisih Kurang		Rp. 24.249.344.522,00

4). Selisih Anggaran dengan realisasi Surplus sejumlah Rp.30.308.229.116,97 dengan rincian sebagai berikut :

a. Defisit setelah perubahan	Rp. 19.925.414.900,00	
b. Realisasi	<u>Rp. 10.382.814.216,97</u>	
Selisih Lebih		Rp. 30.308.229.116,97

5). Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp.30.308.229.116,97 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan		
1. Setelah perubahan	Rp. 39.711.033.769,59	
2. Realisasi	<u>Rp. 39.711.033.769,59</u>	
Selisih Lebih		Rp. -
b. Pengeluaran		
1. Setelah perubahan	Rp. 19.785.618.869,59	
2. Realisasi	<u>Rp. 50.093.847.986,56</u>	
Selisih Lebih		Rp. 30.308.229.116,97

3. Kebijakan Akuntansi yang Penting

a. Entitas pelaporan

Entitas pelaporan keuangan menunjukkan pusat-pusat pertanggungjawaban dalam sistem keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang akan bertindak sebagai entitas akuntansi. Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan secara keseluruhan, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban ada pada Bupati, DPRD, Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, lembaga teknis daerah lainnya, dan non-lembaga daerah yang berhak dan bertanggung jawab menggunakan anggaran dalam rangka pelaksanaan APBD.

b. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah basis akrual untuk pengakuan aktiva, utang, dan ekuitas dana dalam Neraca dan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Perhitungan APBD. Laporan Aliran Kas disusun dengan metode langsung yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode yang berakhir 31 Desember 2003 dan 2002 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan.

c. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan menggunakan nilai perolehan historis kecuali untuk aktiva tetap yang telah dinilai kembali sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku (lihat catatan 11). Aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

d. Akuntansi pendapatan

Pendapatan adalah peningkatan aktiva dan atau penurunan utang yang berasal dari berbagai kegiatan dalam periode berjalan. Dalam pengakuannya, pendapatan dicatat jika telah memenuhi dua kriteria, yaitu ketersediaan (*availability*) dan dapat diukur (*measurable*). Pencatatan pendapatan juga dilakukan berdasarkan asas bruto, yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak dikompensasikan dengan pengeluaran yang terkait atasnya.

e. Akuntansi belanja

Belanja adalah penurunan aktiva dan atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan dalam satu periode akuntansi. Dalam pengakuannya, belanja diakui berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan.

f. Akuntansi pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja dalam satu periode akuntansi. Pengakuan pembiayaan dalam periode berjalan dilakukan pada saat kas diterima untuk penerimaan daerah dan pada saat kas dikeluarkan untuk pengeluaran daerah.

g. Akuntansi aktiva

Aktiva adalah sumber daya ekonomi yang diyakini memiliki potensi keuntungan di masa depan. Tidak termasuk dalam pengertian sumber daya ekonomi adalah sumber daya alam seperti hutan, sungai, danau, rawa, kekayaan di dasar laut, kandungan pertambangan, dan harta peninggalan sejarah.

Pemerintah Kabupaten Lamongan menggunakan metode pencatatan persediaan secara periodik dengan perhitungan berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan pada akhir periode akuntansi. (Lihat catatan 7).

Aktiva tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan diakui sebesar harga perolehan. Pada tahun 2003, dilakukan penilaian kembali terhadap aktiva tetap dimaksud dengan dasar peraturan sebagai berikut :

- UU No. 22 / 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pembinaan pengelolaan barang daerah menjadi wewenang Menteri Dalam Negeri dan pelaksanaan pengelolaannya adalah wewenang Pemerintah Daerah.

- Kepmendagri No. 7 / 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi / Kabupaten.
- Kepmendagri No. 12 / 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah

Tanggal efektif dari aktiva tetap hasil penilaian kembali adalah 30 Juni 2003. Penilai independen yang melakukan penilaian aktiva tetap Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat – Universitas Brawijaya, Malang. (Lihat catatan 11).

h. Akuntansi utang

Utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga yang muncul akibat dari transaksi di masa lalu dimana untuk memenuhi kewajiban tersebut, pemerintah harus melakukan pengorbanan atas aktiva yang dimilikinya.

i. Akuntansi ekuitas dana

Ekuitas dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah utang. Secara lengkap, ekuitas dana terdiri atas ekuitas dana umum, ekuitas dana dicadangkan, dan ekuitas dana donasi.

4. Kas

Kas menunjukkan jumlah saldo kas dan setara kas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lamongan baik yang disimpan di rekening pemerintah di Kas Daerah maupun yang dipegang oleh Satuan Pemegang Kas di Unit Kerja.

Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan per 31 Desember 2003 menunjukkan jumlah sebesar Rp. 31.263.733.156,56

Sementara itu, terdapat kas sebesar Rp.62.420.130,00 di Pemegang Kas.

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2003 DAN 2002

5. Piutang Pajak

Piutang Pajak muncul dikarenakan adanya Surat Keetapan Pajak Daerah (SKPD) yang belum dibayar sampai tanggal 31 Desember 2002 dan 2003.

Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Lamongan per 31 Desember 2002 dan 2003 sebesar Rp4.700.100,00 dan Rp5.831.300,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2003	2002
Pajak Hotel dan Restoran	950.000,00	834.500,00
Pajak Hiburan	200.000,00	750.000,00
Pajak Reklame	2.380.000,00	2.148.600,00
Pajak Pengambilan Galian Gol. C	2.301.300,00	967.000,00
Saldo Piutang Pajak	5.831.300,00	4.700.100,00

6. Piutang Lain-lain

Piutang Lain-lain adalah bagian lancar dari dana-dana *revolving* Pemerintah Kabupaten Lamongan, baik berupa Pinjaman kepada Instansi maupun Penyertaan Dalam Proyek Pembangunan yang akan dikembalikan pada tahun berikutnya, dengan rincian sebagai berikut:

	2003	2002
Bagian Lancar Pinjaman pada Instansi	475.267.268,00	677.146.000,00
Bagian Lancar Penyertaan Dalam Proyek Pembangunan	855.180.000,00	546.810.200,00
Saldo Piutang Lain-lain	1.330.447.268,00	1.223.956.200,00

Perhitungan dana revolving serta alokasi bagian lancarnya dapat dilihat pada catatan 9 dan 10.

7. Persediaan

Persediaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Termasuk dalam Persediaan adalah barang-barang yang

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2003 DAN 2002

dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian jumlah Persediaan adalah sebagai berikut:

	2003	2002
Alat Tulis Kantor di Bagian Umum	85.770.250,00	26.167.000,00
Obat-obatan dan Alat kesehatan habis pakai	2.117.105.714,50	1.798.992.268,00
Persediaan di Dinas Pendapatan	5.477.500,00	16.885.210,00
Saldo Persediaan	2.208.353.464,50	1.842.044.478,00

8. Investasi dalam Saham

Investasi saham adalah penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan di suatu entitas bisnis. Investasi tersebut akan dipertahankan dalam jangka panjang dengan maksud mendapatkan manfaat ekonomis, dan atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Rincian Investasi dalam Saham yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

	2003	2002
Investasi saham di Bank Pasar	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00
Investasi saham di PDAM	7.504.174.092,00	7.204.174.092,00
Investasi saham di Bank Jatim	1.606.000.000,00	547.000.000,00
Investasi saham di PD Aneka Usaha	1.950.000.000,00	750.000.000,00
Saldo Investasi dalam Saham	16.060.174.092,00	11.501.174.092,00

9. Pinjaman pada Instansi

Pemerintah Kabupaten Lamongan mengeluarkan dana *revolving* berupa pinjaman kepada badan usaha milik negara/daerah, badan hukum milik negara/daerah, badan internasional, dan badan usaha lainnya bukan milik daerah, yang dicatat sebagai Pinjaman pada Instansi sebagai berikut:

	2003	Bayar di 2004	Tambahan di 2003	2002
Saldo Pinjaman pada Instansi	18.000.000,00	475.267.268,00	183.750.000,00	309.517.268,00

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2003 DAN 2002

Rencana pembayaran di tahun 2004 sebesar Rp.475.267.268,00 diakui sebagai bagian lancar dari Pinjaman pada Instansi tahun 2003 (lihat catatan 6).

10. Penyertaan Dalam Proyek Pembangunan

Penyertaan Dalam Proyek Pembangunan adalah akumulasi dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan ke proyek yang dilaksanakan dengan maksud untuk mengalihkan sepenuhnya atau sebagian kepemilikan proyek tersebut kepada pihak ketiga setelah proyek mencapai tingkat penyelesaian tertentu. Penyertaan Dalam Proyek pembangunan dibukukan berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut sebagai berikut:

	2003	Bayar di 2004	Tambahn di 2003	2002
Saldo Penyertaan Dalam				
Proyek Pembangunan	3.349.771.300,00	855.180.000,00	1.900.000.000,00	2.304.951.300,00

Rencana pembayaran di tahun 2004 sebesar Rp.855.180.000,00 diakui sebagai bagian lancar dari Penyertaan Dalam Proyek Pembangunan tahun 2003 (lihat catatan 6).

11. Aktiva Tetap

Jumlah tercatat dari Aktiva Tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

	2003	Penambahan	Revaluasi 30 Juni 2003	2002
Tanah	1.472.180.100.880,00	5.993.574.700,00	1.466.186.526.180,00	542.440.839.323,00
Jalan dan Jembatan	603.110.588.700,00	9.153.128.700,00	593.957.460.000,00	109.600.458.012,00
Bangunan Air (Irigasi)	106.086.216.000,00	4.321.476.000,00	101.764.740.000,00	180.313.362.451,00
Bangunan Gedung	213.893.997.000,00	14.813.142.450,00	199.080.854.550,00	124.003.790.422,00
Peralatan dan Mesin	13.069.020.651,00	5.769.906.100,00	7.299.114.551,00	7.582.094.680,00
Alat Angkutan	26.098.579.005,00	9.201.871.500,00	16.896.707.505,00	13.769.449.865,00
Perpustakaan	4.800.999.915,00	2.110.170.000,00	2.690.829.915,00	1.732.992.105,00
Meubelair & Perlengkapn	20.749.230.178,00	1.880.101.500,00	18.869.128.678,00	16.425.345.170,00
Instalansi dan Jaringan	3.523.304.317,00	2.043.772.277,00	1.479.532.040,00	1.535.690.050,00
Aktiva Tetap Lainnya	3.863.320.984,00	1.442.351.799,00	2.420.969.195,00	24.654.671.925,00
Saldo Aktiva Tetap	2.467.376.357.640,00	56.729.496.026,00	2.410.645.862.614,00	1.022.058.694.003,00

Antara 30 Juni 2003 sampai 31 Desember 2003 tidak terdapat pengurangan Aktiva Tetap.

12. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana milik Pemerintah Kabupaten Lamongan yang disimpan pada rekening di Bank Jatim.

13. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah bagian Utang Dalam Negeri yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun dengan rincian sebagai berikut:

	2003	2002
(Dari Utang P3KT)		
Pokok pinjaman	16.583.200,00	16.583.200,00
Bunga	14.035.605,90	15.509.437,80
(Dari Utang Second East Java)		
Pokok pinjaman	25.000.000,00	25.000.000,00
Bunga	27.036.979,17	29.876.041,66
Jasa bank	587.760,42	649.479,16
Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	83.243.545,49	87.618.158,62

Perhitungan Utang dalam Negeri beserta alokasi bagian lancarnya dapat dilihat pada catatan 15.

14. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Perhitungan Pihak Ketiga merupakan utang jangka pendek kepada pihak ketiga yang berasal dari jumlah yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM), misalnya askes, taspen, bulog, PPh 21, dan lain-lain yang sejenis. Rinciannya adalah sebagai berikut:

	2003	2002
Pendapatan perhitungan pihak ketiga (UKP)		
Iuran wajib pegawai	16.035.387.744,00	13.336.939.151,00
Penerimaan PPh 21	842.615.592,00	6.377.934.463,00
Pot. Tabungan Uang Muka Perumahan pegawai	909.565.000,00	883.937.000,00
Penerimaan untuk pihak ketiga	9.386.827.100,00	4.270.161.229,00
Jumlah pendapatan	27.174.395.436,00	24.868.971.843,00

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2003 DAN 2002

Belanja Perhitungan Pihak Ketiga

Iuran wajib pegawai	16.035.387.744,00	13.336.939.151,00
Penerimaan PPh 21	842.615.592,00	6.377.934.463,00
Pot. Tabungan uang muka perumahan pegawai	909.565.000,00	883.937.000,00
Pembayaran untuk pihak ketiga	8.612.938.600,00	3.785.377.700,00
Jumlah belanja	26.400.506.936,00	24.384.188.314,00
Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga	773.888.500,00	484.783.529,00

15. Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri adalah bagian jangka panjang dari utang pemerintah setelah dikurangi bagian lancarnya. Rincian Utang Dalam Negeri dari Pemerintah Kabupaten Lamongan setelah dikurangi bagian lancarnya sebesar Rp.87.618.158,62 pada tahun 2002 dan Rp.83.243.545,49 pada tahun 2003 (lihat catatan 13) adalah sebagai berikut:

	2003	2002
(Dari Utang P3KT)		
Pokok pinjaman	140.957.200,00	157.540.400,00
Bunga	57.688.775,30	71.900.243,40
(Dari Utang Second East Java)		
Pokok pinjaman	212.500.000,00	237.500.000,00
Bunga	110.883.852,77	137.810.590,28
Jasa bank	1.823.663,78	2.511.945,04
Saldo Utang Dalam Negeri	523.853.491,85	607.263.178,72

16. Ekuitas Dana Lancar

Rincian Ekuitas Dana Lancar dari Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sbg berikut :

	2003	2002
SILPA tahun pelaporan	31.326.153.286,56	40.195.817.298,59
Cadangan untuk piutang	1.336.278.568,00	1.228.656.300,00
Cadangan untuk persediaan	2.208.353.464,50	1.842.044.478,00
Dana untuk pembayaran utang jangka pendek	(857.132.045,49)	(572.401.687,62)
Saldo Ekuitas Dana Lancar	34.013.653.273,57	42.694.116.388,97

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2003 DAN 2002

17. Ekuitas Dana yang Diinvestasikan

Rincian Ekuitas Dana yang Diinvestasikan dari Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

	2003	2002
Diinvestasikan dlm investasi jk panjang	19.427.945.392,00	14.115.642.660,00
Diinvestasikan dalam aktiva tetap	2.467.375.357.640,00	1.022.058.694.003,00
Dana utk pembayaran utang jk. panjang	(523.853.491,85)	(607.263.178,72)
Saldo Ekuitas Dana yg Diinvestasikan	2.486.279.449.540,15	1.035.567.073.484,28

18. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah dari Pemerintah Kabupaten Lamongan merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di Kabupaten Lamongan, dengan rincian sebagai berikut :

	ANGGARAN	REALISASI	%
Pajak daerah	6.326.142.000,00	7.397.214.285,00	116,93%
Retribusi daerah	7.568.664.600,00	7.631.831.297,00	100,83%
Hasil perusahaan milik daerah	734.619.000,00	734.619.479,09	100,00%
Lain-lain pendapatan asli daerah yg sah	16.471.953.000,00	16.551.004.898,88	100,48%
Saldo Pendapatan Asli Daerah	31.101.378.600,00	32.314.669.959,97	103,90%

19. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendapatan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang sumber dananya berasal dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka otonomi daerah, dengan rincian sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2003 DAN 2002

	ANGGARAN	REALISASI	%
Bagi hasil pajak / bukan pajak	17.862.728.000,00	20.113.982.428,00	112,60%
Dana Alokasi Umum (DAU)	296.740.000.000,00	296.740.000.000,00	100,00%
Dana Alokasi Khusus (DAK)	6.300.000.000,00	6.300.000.000,00	100,00%
Bagi hasil pajak & bantuan keuangan	12.054.411.000,00	15.737.264.399,00	130,55%
Saldo Dana Perimbangan	332.957.139.000,00	338.891.246.827,00	101,78%

20. Lain-lain Pendapatan yang sah

Dana Lain-lain Pendapatan yang sah merupakan pendapatan yang sumber dananya berasal dari penerimaan APBN berupa Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang dari Pemerintah dan Pendapatan Restitusi Pajak yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka otonomi daerah, dengan rincian sebagai berikut :

	ANGGARAN	REALISASI	%
Bantuan Dana Kontijensi.	23.892.590.000,00	22.713.629.252,00	95,07%
Pendapatan Restitusi Pajak.	4.800.000.000,00	4.890.446.156,00	101,88%
Saldo Lain-lain Pendapatan Yg Sah	28.692.590.000,00	27.604.075.408,00	99,99%

21. Belanja

a. Belanja Administrasi Umum

Aparatur Daerah :

	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja pegawai/personalia	68.048.436.500,00	60.781.207.243,00	89,32%
Belanja barang & jasa	7.207.114.500,00	6.822.468.719,00	94,66%
Belanja perjalanan dinas	1.290.230.000,00	1.215.371.999,00	94,20%
Belanja pemeliharaan	3.207.428.000,00	3.058.805.330,00	95,37%
Saldo	79.753.202.000,00	71.877.853.291,00	90,13%

Pelayanan Publik :

	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja pegawai/personalia	174.350.707.000,00	161.893.385.807,00	92,86%
Belanja barang & jasa	7.761.689.000,00	7.287.243.837,00	93,89%
Belanja perjalanan dinas	2.270.377.000,00	2.268.730.600,00	99,93%
Belanja pemeliharaan	1.992.783.000,00	1.969.693.559,00	98,84%
Saldo	186.375.556.000,00	173.419.053.803,00	93,05%

b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan

Aparatur Daerah :

	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja pegawai/personalia	2.270.411.250,00	2.218.758.800,00	97,72%
Belanja barang & jasa	5.726.545.750,00	5.307.198.717,00	92,68%
Belanja perjalanan dinas	350.669.000,00	337.689.000,00	96,30%
Belanja pemeliharaan	266.398.000,00	263.986.000,00	99,09%
Saldo	8.614.024.000,00	8.127.632.517,00	94,35%

Pelayanan Publik :

	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja pegawai/personalia	885.445.000,00	853.585.000,00	96,40%
Belanja barang & jasa	11.989.037.500,00	11.867.876.827,00	97,99%
Belanja perjalanan dinas	431.032.000,00	391.897.000,00	90,92%
Belanja pemeliharaan	16.658.197.500,00	16.582.720.800,00	99,55%
Saldo	29.963.712.000,00	29.696.079.627,00	98,71%

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2003 DAN 2002

c. Belanja Modal

Uraian	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja modal Aparatur Daerah	26.556.138.000,00	26.449.161.700,00	99,60%
Belanja modal Pelayanan Publik	38.286.106.000,00	38.148.353.876,00	99,64%

d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

Uraian	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	39.712.777.500,00	39.393.679.164,00	99,20%

e. Belanja Tidak Tersangka

Uraian	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Tidak Tersangka	3.415.000.000,00	1.315.364.000,00	42,03%

22. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan meliputi :

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah seluruh transaksi penerimaan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan pembiayaan meliputi : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang lalu, Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan, Penjualan Investasi lainnya, Pinjaman Luar Negeri, Pinjaman dari Pemerintah Pusat, Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya, Pinjaman dari BUMN/BUMD, Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan dan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya.

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2003 sebesar Rp.39.711.033.769,59. Jumlah tersebut merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah seluruh transaksi pengeluaran yang dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran antara lain untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, penyertaan modal pemerintah, Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan serta Dana Cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2003 sebesar Rp.50.093.847.986,56 dengan rincian sebagai berikut :

• Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	Rp. 41.583.200,00
• Investasi Saham	Rp. 4.500.000.000,00
• Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	Rp.30.552.264.786,56
• Dana Cadangan	Rp.15.000.000.000,00

23. Laporan Aliran Kas

Laporan Aliran Kas merupakan salah satu jenis laporan pertanggungjawaban yang merupakan hasil proses akuntansi atas transaksi-transaksi keuangan pemerintah daerah baik dari transaksi anggaran maupun non anggaran.

Laporan Aliran Kas merupakan laporan yang memuat perbandingan selisih antara penerimaan kas (kas masuk) dengan pengeluaran kas (kas keluar) selama satu periode akuntansi. Laporan Aliran Kas akan menunjukkan adanya kenaikan/penurunan kas pemerintah daerah dalam berkaitan dengan aktivitas keuangan pemerintah daerah.

Laporan Aliran Kas meliputi secara lengkap terdiri atas :

- Aliran Kas dari Aktivitas Operasi
- Aliran Kas dari Aktivitas Investasi
- Aliran Kas dari Aktivitas Pembiayaan
- Aliran Kas dari Aktivitas non Anggaran

a. Aliran Kas dari Aktivitas Operasi

Aliran Kas dari Aktivitas Operasi mencerminkan posisi penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan kegiatan operasi dari pemerintah daerah yang meliputi Aliran kas masuk dan Aliran kas keluar. Selisih antara Aliran masuk kas dari aktivitas operasi dengan Aliran keluar kas dari aktivitas operasi merupakan Aliran kas bersih dari aktivitas operasi yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Lamongan menghasilkan kas tanpa ada bantuan sumber daya lain.

b. Aliran Kas dari Aktivitas Investasi

Aliran Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan posisi penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan kegiatan Investasi dari pemerintah kabupaten. Selisih antara Aliran kas masuk dari aktivitas Investasi dengan Aliran kas keluar dan aktivitas Investasi menghasilkan Aliran kas bersih dari aktivitas Investasi

c. Aliran Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Aliran Kas dari Aktivitas Pembiayaan mencerminkan posisi penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan kegiatan Pembiayaan dari pemerintah daerah yang meliputi Aliran kas masuk dan Aliran kas keluar. Selisih antara Aliran masuk kas dari aktivitas Pembiayaan dengan Aliran keluar kas dari aktivitas Pembiayaan merupakan Aliran kas bersih dari aktivitas Pembiayaan.

d. Aliran Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Transaksi non-anggaran adalah transaksi keuangan pemerintah yang tidak mempengaruhi anggaran. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh pemerintah atas pembayaran yang dilakukan. Uang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak pemerintah tetapi merupakan milik pihak ketiga. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk menyetorkannya kepada pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penerimaan kas yang tidak mempengaruhi anggaran yang berasal dari potongan seperti ini disebut Penerimaan Perhitungan Pihak ketiga (PFK) dan penyetoran kepada pihak ketiga yang bernak atas uang tersebut disebut Pengeluaran Perhitungan Pihak ketiga (PFK).

Penerimaan PFK adalah penerimaan kas daerah yang berasal dari potongan pembayaran (SPM), PPh Pasal 21, yang menjadi hak Pemerintah Pusat, potongan Taspen, Askes, Taperum, dan penerimaan untuk kepentingan pihak ketiga lainnya.

Pengeluaran PFK adalah pengeluaran kas daerah untuk penyetoran pungutan atau potongan yang telah dilakukan oleh pemerintah Daerah seperti penyetoran PPh Pasal 21, kepada Pemerintah Pusat, iuran pensiun ke Taspen, premi asuransi kesehatan ke Askes, dan tabungan perumahan ke Taperum.